

Global Insights

Kumpulan Isu Internasional
Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
Volume 1/2023-2024



Pengantar: **Ogi Prastomiyono**
Penulis: **Dr. Djonieri, dkk**

Global Insights:

Kumpulan Isu Internasional
Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
Volume 1 /2023-2024

Penulis:

Dr. Djonieri
Asep Suwondo
Agung Wasono
Dina Azhara
Agung Praditya
Nur Afni Panjaitan
Ramadhani Lisa Rusanti
Nalissa



© Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Direktorat Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
(DPAP)
Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP
Otoritas Jasa Keuangan

Pengantar

Global Insights: Kumpulan Isu Internasional Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut dengan antusias terbitnya buku “Global Insights: Kumpulan Isu Internasional Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun”. Buku ini adalah wujud komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung transformasi sektor jasa keuangan nasional dengan melihat tren global, sejalan dengan semangat *think globally, act locally*.

Buku ini tidak hanya menjadi refleksi atas dinamika dan perkembangan internasional, tetapi juga panduan strategis dalam membangun ekosistem keuangan nasional yang tangguh. Artikel dalam buku ini menggambarkan kompleksitas dan prioritas dalam mengembangkan dan memperkuat industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Pertama, industri perasuransian. Berbagai isu dalam industri asuransi tergambarkan dalam buku ini, antara lain: perlunya pendalaman pasar bagi industri asuransi melalui inovasi produk asuransi, asuransi properti, asuransi parametrik, dan asuransi syariah. Buku ini juga menyajikan pentingnya aturan yang sesuai dengan standar global melalui penerapan IFRS 17, pentingnya *database* polis dan klaim, perlunya meningkatkan literasi dan inklusi asuransi, serta urgensi industri asuransi mengikuti tren global terkait *sustainable finance*.

Kedua, industri penjaminan. Buku ini juga menyajikan informasi tentang industri penjaminan di berbagai yurisdiksi. Di beberapa negara, penjaminan mendapatkan perhatian melalui kontribusinya terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain UMKM, penjaminan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan *startup* dengan

mempermudah akses pembiayaan, mengurangi risiko, dan mendorong inovasi. Peran kolaborasi penjaminan dalam mendukung UMKM juga menjadi atensi regulator di dunia. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai *stakeholder* seperti perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya.

Ketiga, industri dana pensiun. Informasi dalam buku ini juga menyajikan praktik dana pensiun secara global. Di dunia, industri dana pensiun juga menghadapi tantangan seiring dengan perubahan dinamika ekonomi global, kemajuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat akan perlindungan masa pensiun yang lebih baik. Terobosan mengenai pengelolaan investasi yang maksimal terus digali melalui berbagai diskusi di lingkup internasional. Penyesuaian atas skema dana pensiun di beberapa negara juga terus dilakukan dengan harapan dapat memenuhi kewajiban pensiun masyarakat di masa depan. Di sisi lain, digitalisasi dana pensiun memainkan peran penting untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun.

Buku ini memberikan pembelajaran dari berbagai negara yang berguna untuk memperkaya analisis dalam menyusun regulasi, memperluas kolaborasi lintas sektor, dan memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan global. Dalam hal ini, OJK juga terus menjembatani kebutuhan nasional dengan menyesuaikan praktik terbaik yang diterapkan di berbagai belahan dunia.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para penulis dan kontributor, yaitu: Djonieri, Asep Suwondo, Agung Wasono, Dina Azhara, Agung Praditya, Nur Afni Panjaitan, Ramadhani Lisa Rusanti, dan Nalissa, atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyusun PPDP *International Update* yang terbit dua kali setiap bulan dan akhirnya dikompilasi menjadi buku ini. Semoga publikasi ini menjadi acuan penting dalam perjalanan transformasi sektor jasa keuangan nasional yang berdaya saing global, stabil, dan berkelanjutan.

Selamat membaca.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ogi Prastomiyono

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tentang Buku Global Insights

Buku *Global Insights* merupakan kompilasi isu-isu internasional yang awalnya diterbitkan sebagai *PPDP International Updates* oleh Direktorat Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *PPDP International Updates* pertama kali diterbitkan pada Agustus 2023 dan secara konsisten hadir dua kali setiap bulan hingga saat ini, menyediakan wawasan global terkini mengenai sektor asuransi, penjaminan, dan dana pensiun.

Volume pertama buku *Global Insights* ini merangkum perkembangan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan di industri asuransi, penjaminan, dan dana pensiun dari berbagai otoritas di seluruh dunia sepanjang tahun 2023 dan 2024. Selain menjadi referensi informasi global, isu-isu internasional yang disajikan juga berfungsi sebagai acuan *benchmarking* dalam mendukung proses pengambilan kebijakan di OJK.

Buku ini dipublikasikan untuk memberikan informasi dan *insights* global kepada pembaca mengenai dinamika industri asuransi, penjaminan, dan dana pensiun. Isinya mencakup berbagai tema strategis, seperti reformasi industri, inovasi produk dan layanan, investasi, keuangan berkelanjutan, isu lintas batas, serta topik relevan lainnya yang mencerminkan perkembangan industri global.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan wawasan bagi para pembaca dalam memahami dan mengikuti perkembangan global di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

DAFTAR ISI

Pengantar	2
Tentang Buku Global Insights	5
Daftar Isi	6
BAGIAN 1 PERASURANSIAN	
Reformasi Asuransi	9
Inovasi Produk Asuransi	10
Asuransi Properti	15
Asuransi Sistemik	16
Asuransi Kendaraan Bermotor	16
Asuransi Parametrik	19
Asuransi Kesehatan	21
Asuransi Perjalanan	23
Asuransi Syariah	23
Asuransi Sosial	24
PAYDI	24
<i>Cross Border Operation</i>	25
<i>Stress Test</i>	25
Program Penjaminan Polis	26
Perubahan Kebijakan	27
<i>Fraud</i> dan Perlindungan Industri	30
Implementasi IFRS 17	31
<i>Cross Border Investment</i>	32
<i>Sustainable Finance</i>	33
Literasi dan Inklusi Asuransi	34
Agen dan Distribusi Produk Asuransi	35
Perundingan Dagang Internasional	36
Sertifikasi dan Pelatihan Pengawas Asuransi	36
<i>Database</i> Polis dan Klaim	38
Standar Internasional	38

BAGIAN 2 PENJAMINAN

Kolaborasi Penjaminan	41
Program Penjaminan untuk UMKM	42
Penjaminan untuk <i>Startup</i>	44

BAGIAN 3 DANA PENSIUN

Resolusi/Penyelamatan Dana Pensiun	46
<i>Cross Border Operation</i>	46
Investasi Dana Pensiun	47
Publikasi Kinerja Dana Pensiun	50
<i>Governance</i>	52
<i>Cross Border Investment</i>	52
Pengelolaan Dana Pensiun	53
Perlindungan dan Fasilitas Peserta Dana Pensiun	54
Panduan Komprehensif Dana Pensiun	56
Aset Dana Pensiun	56
<i>Leverage</i> di Dana Pensiun	57
Digitalisasi Dana Pensiun	57
Pihak Utama Dana Pensiun	58
Reformasi Sistem Pensiun	59
Perubahan Kebijakan	62
<i>Sustainable Finance</i>	63
Akun Dana Pensiun	64
Kelembagaan Dana Pensiun	64
Sertifikasi dan Pelatihan Pengawas	65
Besaran Kontribusi Dana Pensiun	65
Skema Pensiun	67

BAGIAN I

Industri Perasuransian

Reformasi Asuransi

Pemerintah Inggris akan Menetapkan Rezim Resolusi bagi Perusahaan Asuransi

Pemerintah Inggris sedang menyusun undang-undang untuk memperkenalkan rezim resolusi bagi perusahaan asuransi, bertujuan untuk memberikan kekuatan dan fleksibilitas kepada *Bank of England* dalam menangani kegagalan perusahaan asuransi besar. Rezim ini mengadopsi pendekatan yang mirip dengan rezim resolusi perbankan yang diperkenalkan pada tahun 2009. Langkah ini dirancang untuk melindungi stabilitas keuangan, memastikan kontinuitas layanan kepada pemegang polis, serta meminimalkan dampak pada pembayar pajak. Salah satu prinsip utama yang diusulkan adalah penerapan “*No Creditor Worse Off*” (NCWO). Prinsip ini menjamin bahwa pemegang polis atau kreditor tidak akan berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan jika perusahaan asuransi berada dalam likuidasi sesuai aturan kebangkrutan. Rezim resolusi ini mencerminkan langkah-langkah yang telah diterapkan di Uni Eropa dan bertujuan untuk meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko serta memastikan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan ini juga melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas dalam penerapannya.

Sumber: [Government's response to the consultation on introducing an Insurer Resolution Regime](#)

Industri Asuransi Florida menerapkan Reformasi Pengurangan Ketergantungan pada Asuransi BUMN

Akhir tahun 2024 merupakan momen penting reformasi legislatif Florida yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada perusahaan asuransi yang dikelola negara. Hal ini dilihat dari penurunan polis *Citizens Property Insurance*. Melalui “proses depopulasi,” perusahaan asuransi swasta mulai mengambil alih polis *Citizens* dengan menawarkan tarif dalam kisaran 20% dari premi yang ada. Namun, proses ini juga memicu kekhawatiran di antara pemilik rumah yang khawatir kenaikan premi dapat membuat rumah mereka tidak terjangkau. *Citizens* mengakui kesulitan tersebut tetapi menekankan bahwa *Citizens* harus tunduk pada pedoman hukum dan menghindari persaingan dengan pasar asuransi swasta yang sedang

pulih. Proses depopulasi berlanjut dengan transfer polis lebih lanjut yang direncanakan hingga tahun 2025, didukung oleh sumber daya untuk membimbing pemilik rumah yang terkena dampak.

Sumber: [*Over 400,000 moved off Citizens Property Insurance as take-outs continue*](#)

Inovasi Produk Asuransi

Onedegree Menjadi Perusahaan Asuransi Pertama di Asia yang Menyediakan Produk Perlindungan Aset Digital

Sebagai salah satu perusahaan *InsurTech* dengan pertumbuhan tercepat di Asia, Perusahaan *OneDegree* Hong Kong (www.onedegree.hk) telah mengumumkan bahwa perusahaan mulai menyediakan perlindungan asuransi untuk aset digital. Pada awal September 2023, *OneDegree* telah menandatangani nota kesepahaman dengan *HashKey* yang merupakan perusahaan manajemen aset dan keuangan digital terbesar di Asia yang berkedudukan di Hong Kong untuk perlindungan asuransi pada *exchange wallet* mata uang kripto. Polis asuransi akan berlaku untuk skema sarana penyimpanan dan pertukaran uang kripto secara online (*hot wallet*) maupun offline (*cold storage*). Polis asuransi ini mencakup kerugian mata uang kripto yang disebabkan oleh peretasan, pencurian, atau tindakan jahat lainnya.

Sumber: [*OneDegree becomes the first Asia-headquartered insurer to bring protection for digital assets | HashKey signs MOU for crypto exchange insurance*](#)

MoneyOwl Singapura Berhenti Beroperasi, Bisnis Asuransinya dialihkan ke iFAST Financial Pte.

Perusahaan *MoneyOwl* (www.moneyowl.com.sg) yang berbasis di Singapura baru saja mengumumkan penghentian bisnis financial advisory termasuk lini usaha asuransinya. Semua aktivitas komersial *MoneyOwl* juga akan dihentikan pada tanggal 31 Desember 2023. *MoneyOwl* merupakan bagian dari Koperasi *National Trade Union Congress* (NTUC). Keputusan untuk menghentikan kegiatan ini menyusul asesmen bersama oleh perusahaan dan *NTUC Enterprise Co-operative Limited* bahwa bisnis tersebut tidak akan layak secara komersial. Sebagai bagian dari proses penutupan, *MoneyOwl* akan mengalihkan bisnis asuransinya ke

iFAST Financial Pte (“iFAST”) mulai September 2023. Perusahaan telah berhenti menerima permohonan asuransi baru sejak 8 September 2023.

Sumber: [*Singapore-based MoneyOwl to wind down financial advice arm*](#)

Asuransi Mitsui Sumitomo Berencana Menyediakan Asuransi untuk Wisata Luar Angkasa

Mitsui Sumitomo Insurance, perusahaan asuransi Jepang, tengah mengembangkan perlindungan khusus untuk wisata luar angkasa dan berupaya untuk meluncurkan produk tersebut sekitar tahun 2030. Perusahaan ini telah menjalin kemitraan dengan 17 perusahaan terkait untuk merancang kebijakan asuransi luar angkasa, termasuk *All Nippon Airways* (ANA) yang dapat memberikan wawasan tentang penerbangan dan pemeliharaan roket, serta *Agen Perjalanan H.I.S.* yang berpotensi menawarkan produk wisata luar angkasa. Mitsui Sumitomo berencana untuk menyediakan perlindungan terhadap cedera dan masalah lain yang mungkin timbul selama pemegang polis berada di luar angkasa, termasuk masalah kesehatan akibat paparan radiasi.

Sumber: [*Space tourism insurance envisioned by Japan's Mitsui Sumitomo - Nikkei Asia*](#)

Akur8 dan Quincy Mutual Group Bekerjasama dalam Penetapan Premi menggunakan AI Machine Learning

Akur8 (akur8.com), sebuah perusahaan multinasional di bidang *financial technology* khususnya asuransi, telah bermitra dengan *Quincy Mutual Group*, sebuah perusahaan asuransi terkemuka di Amerika Serikat. Aliansi strategis ini bertujuan untuk memberdayakan tim aktuaria *Quincy Mutual*, memungkinkan mereka membangun model komprehensif secara efisien, mengintegrasikan pengujian model ke dalam proses penetapan harga dan meningkatkan evaluasi tarif premi dengan menggabungkan pendekatan yang lebih berbasis data. Solusi ini dirancang khusus untuk perusahaan asuransi, yang bertujuan untuk memperbarui proses penetapan harga melalui salah satu aplikasi teknologi AI yaitu *machine learning*.

Sumber: [*Akur8 and Quincy Mutual Group unite to revolutionise insurance pricing strategy*](#)

Perusahaan Asuransi US Bermitra untuk Memperkenalkan Kredit Karbon Berasuransi di Australia

Perusahaan asuransi kredit karbon AS, *Oka*, bekerjasama dengan *Clima*, sebuah *platform* solusi karbon dari Australia, untuk meluncurkan asuransi kredit karbon di Australia. *Clima* selama ini menghubungkan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dengan berbagai kredit karbon di Australia. Melalui kolaborasi baru dengan *Oka* ini, klien *Clima* mendapatkan akses eksklusif ke kredit karbon yang dilindungi asuransi. *Oka* dan *Clima* bermitra pada saat penting dimana pemerintah Australia menerbitkan rancangan undang-undang yang mewajibkan perusahaan-perusahaan besar di negara tersebut untuk mengungkapkan risiko dan peluang keuangan terkait perubahan iklim.

Sumber: [*Oka and Clima partner to introduce insured carbon credits in Australia*](#)

Filipina Menggandakan Perlindungan *Third Party Liability* pada Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor

Insurance Commission (IC) Filipina telah meningkatkan manfaat asuransi wajib kendaraan bermotor (*Compulsary Motor Vehicle Liability Insurance/CMVLI*) bagi pihak ketiga (*third party liability*). Batas tanggung jawab pihak ketiga telah ditingkatkan 2 kali lipat menjadi P200,000 (55,5 juta). Sementara ganti rugi kematian, termasuk biaya penguburan dan pemakaman ditingkatkan hingga 65%. Meskipun terdapat perubahan manfaat, premi untuk CMVLI tetap tidak berubah sesuai surat edaran IC sebelumnya. CMVLI bersifat wajib untuk registrasi kendaraan, memastikan bahwa pemilik dapat memberikan kompensasi kepada pihak ketiga atau penumpang atas cedera atau kematian terkait kecelakaan. Pembaruan ini menunjukkan komitmen IC dalam meningkatkan cakupan asuransi dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam insiden kendaraan bermotor.

Sumber: [*Philippines doubles third-party liability insurance coverage*](#)

Polis Asuransi Kendaraan Listrik Baterai Resmi Pertama di Thailand

Office of Insurance Commission (OIC) Thailand telah memperkenalkan standar dan tarif premi untuk polis asuransi *Battery Electric Vehicle* (BEV). Perusahaan asuransi harus mematuhi standar baru ini sejak tanggal 31 Mei 2024. Pemerintah ini berlaku secara eksklusif untuk BEV, tidak termasuk

kendaraan *hybrid*. Polis asuransi ini mengecualikan perlindungan terhadap kerusakan pada pengisi daya BEV, kecuali jika ada premi tambahan. Polis asuransi BEV menetapkan tingkat penyusutan baterai BEV berdasarkan usia baterai untuk menentukan kompensasi maksimum atas kerusakan baterai. Tidak seperti asuransi tradisional, polis BEV wajib mendaftarkan nama pengemudi hingga lima pengemudi per kendaraan, dengan nilai premi yang didasarkan atas perilaku pengemudi dan bukan riwayat klaim kendaraan. Oleh karena itu, premi akan mencerminkan baik atau buruknya kebiasaan mengemudi.

Sumber: [Thailand: First official battery electric vehicles insurance policy - Baker McKenzie](#)

New York Menerbitkan Aturan Penggunaan AI dalam Penetapan Premi Asuransi

New York State Department of Financial Services (NYSDFS) baru saja menerbitkan Surat Edaran mengenai penggunaan *artificial intelligence systems* (AIS) dan *external consumer data and information sources* (ECDIS) dalam proses *underwriting*, penetapan premi asuransi, dan pemrosesan klaim. Surat edaran ini meminta perusahaan asuransi untuk menilai dan mengurangi potensi bias dan hasil yang diskriminatif dalam penggunaan teknologi ini. Beberapa ketentuan yang diatur dalam surat edaran ini antara lain definisi AIS dan ECDIS, penilaian *proxy* dan kuantitatif, GCG, pengawasan direksi, dan lainnya. NYSDFS menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap UU anti diskriminasi dan tata kelola yang tepat dalam penggunaan AI dan ECDIS. Perusahaan asuransi juga harus memastikan bahwa sistem AI mereka selaras dengan standar hukum pada level Negara Bagian dan Federal yang terus berkembang.

Sumber: [New York Issues Final Insurance Circular Letter on Consumer Data](#)

Walnut Kanada Memperoleh Pendanaan untuk Meningkatkan Platform Teknologi Embedded Insurance

Walnut (www.gowalnut.com), perusahaan *insurtech* asal Kanada telah mendapatkan pendanaan sebesar \$4,6 juta (Rp73,3 miliar) dari *Allianz X* (allianzx.com) dan *Portgage Ventures* (portgageinvest.com) pada Agustus 2024 untuk meningkatkan *platform* teknologi *embedded insurance*, yang bertujuan untuk mengubah distribusi asuransi dengan mengintegrasikan

produk asuransi ke dalam layanan perusahaan dan lembaga keuangan. Dengan tambahan dana ini, *Walnut* berencana untuk meningkatkan kapasitas teknologinya serta memperluas kemitraan dan integrasi dengan berbagai mitra strategis di seluruh dunia. Pendekatan *Walnut* ini akan mengurangi biaya pemasaran dan memastikan pengalaman baik bagi konsumen. Bagi konsumen, teknologi ini menyederhanakan proses pembelian asuransi dan menawarkan produk yang disesuaikan (*tailored products*). Karena kondisi ekonomi saat ini, *Walnut* menyatakan saat ini mereka fokus pada produk perlindungan pinjaman dan utang (asuransi kredit).

Sumber: [*Walnut raises \\$4.6m to revolutionise embedded insurance distribution | Walnut secures funding to expand embedded insurance technology*](#)

Tiongkok Pelopor Masa Depan Asuransi Mobil Listrik

Dominasi Tiongkok di pasar kendaraan listrik (EV) mengubah industri asuransi mobil melalui teknologi dan inovasi berbasis data. Dengan lebih dari 9,5 juta *new energy vehicles* (NEV) yang terjual pada tahun 2023, tanggung jawab beralih dari pemilik ke produsen, sehingga mendorong model asuransi baru. Regulasi Tiongkok yang fleksibel telah memungkinkan pengembangan produk asuransi yang inovatif, seperti *usage-based insurance* (UBI) dan polis sesuai permintaan, yang secara dinamis menyesuaikan premi berdasarkan perilaku mengemudi dan penggunaan kendaraan. Produsen NEV kini menawarkan opsi asuransi terintegrasi, menciptakan polis yang sangat personal dan manajemen klaim otomatis. Inovasi asuransi EV Tiongkok memengaruhi standar global, menyediakan model bagi pasar di seluruh dunia untuk mengembangkan solusi asuransi yang fleksibel dan berbasis teknologi sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Sumber: [*China's Electric Vehicle Revolution: Pioneering the Future of Auto Insurance*](#)

Asuransi Properti

Klaim asuransi properti di Florida meningkat drastis akibat Badai Idalia

Sampai dengan 7 September 2023, kerusakan akibat Badai *Idalia* yang terjadi pada awal September telah merugikan industri asuransi hampir 98 juta Dolar Amerika karena lebih dari 8.500 orang mengajukan klaim atas rumahnya. Namun, industri asuransi di Florida optimis bahwa perusahaan asuransi memiliki cukup likuiditas untuk membayar klaim para pemegang polis. Hal ini didukung dengan tarif asuransi rumah di Florida yang cukup tinggi. Rata-rata premi di negara bagian Florida sebesar 6.000 Dolar Amerika (Rp91 juta) per tahun untuk tahun 2023 jauh melebihi rata-rata nasional sebesar 1.700 Dolar Amerika (Rp26 juta). Sejak tahun lalu, tarif asuransi di Florida telah meningkat sebesar 42%.

Sumber: [Early estimates show Florida insurance costs for Hurricane Idalia | WFIT](#)

Perhatian Regulator Uni Eropa Terhadap Risiko Iklim di Asuransi

European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) menegaskan bahwa tindakan yang mendesak diperlukan untuk melindungi EU dari dampak ekonomi akibat bencana alam. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan tingkat kerusakan yang berdampak pada peningkatan harga premi dan terdapat kekhawatiran akan krisis “*insurabilitas*” dimana tidak lagi dapat diterima oleh asuransi. Menurut data EIOPA, EU menderita kerugian ekonomi lebih dari €50 miliar atau sebesar Rp869,75 triliun akibat bencana alam pada tahun 2021 dan 2022 dan hanya seperempatnya yang diasuransikan sehingga menyebabkan lebarnya *protection gap*. Sementara itu, perusahaan asuransi di EU merespon dengan menaikkan harga premi secara signifikan. EU mulai mendorong skema *Public-Private Partnership* sehingga pemerintah dapat melakukan *risk-sharing* untuk bencana alam dengan sektor asuransi. Selain itu, EIOPA juga mendorong pemanfaatan pasar reasuransi yang lebih luas untuk berinvestasi di pasar sekuritas yang dikaitkan dengan asuransi – seperti obligasi bencana alam, yang dapat dibayarkan untuk peristiwa cuaca ekstrem tertentu.

Sumber: [EU regulator urges action on climate threat to insurance \(ft.com\)](#)

Asuransi Sistemik

MAS Menerbitkan Daftar Perdana Perusahaan Asuransi Penting dan Sistemik (*Domestic Systemically Important Insurers/D-SIIs*)

Pada tanggal 21 September 2023, *Monetary Authority of Singapore* (MAS) menerbitkan *framework* untuk menetapkan perusahaan asuransi di Singapura yang dianggap penting dan sistemik secara domestik (D-SIIs). Terdapat 4 (empat) perusahaan asuransi yang masuk dalam daftar yakni: *AIA Singapura Private Limited*, *Income Insurance Limited*, *Prudential Assurance Company Singapore Limited*; dan *The Great Eastern Life Assurance Company Limited*. Framework ini menilai 4 hal yakni: ukuran (*size*), *interconnectedness*, *substitutability* dan *complexity*. Mulai 1 Januari 2024, perusahaan yang masuk dalam daftar D-SIIs diwajibkan memiliki 25% modal lebih tinggi dan rencana kesiapsiagaan dalam melakukan pemulihan dan resolusi jika terdapat tekanan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Sumber: [*MAS Publishes Inaugural List of Domestic Systemically Important Insurers in Singapore | MAS' Framework For Impact And Risk Assessment Of Financial Institutions*](#)

Asuransi Kendaraan Bermotor

Premi Asuransi Mobil di New Zealand Meningkatkan Tajam

Menurut lembaga survei *Consumer NZ*, premi asuransi mobil di New Zealand melonjak hingga 38 persen dalam dua tahun terakhir. Ketua tim *Consumer NZ* mengatakan kenaikan biaya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain peristiwa cuaca ekstrem, banjir di Auckland dan Topan Gabrielle serta meningkatnya inflasi. Survei tersebut juga menemukan bahwa semakin banyak orang yang tidak mengasuransikan kendaraannya karena mahalnya biaya. Kepala Eksekutif *Insurance Council Of New Zealand* (ICNZ) juga mengatakan bahwa model mobil modern yang memiliki lebih banyak teknologi juga berkontribusi dalam peningkatan premi karena lebih mahal untuk diperbaiki.

Sumber: [*Car insurance premiums sky rocket | RNZ News*](#)

Polis Asuransi Kendaraan Meningkat 2 Juta Lebih di Australia pada 2023

Data baru dari lembaga penelitian *Roy Morgan* menunjukkan bahwa terdapat hampir dua juta lebih polis asuransi kendaraan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Peningkatan substansial dalam populasi Australia setelah pelonggaran pembatasan COVID telah berkontribusi pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di jalan-jalan Australia. Hal tersebut menyebabkan peningkatan pada jumlah polis asuransi kendaraan sebesar 1,6 juta pada posisi Oktober 2023 (YoY). *Australian Associated Motor Insurers (AAMI)*, *Allianz* dan *NRMA Insurance* mempunyai pangsa terbesar di antara polis asuransi kendaraan pendatang baru.

Sumber: [*There were nearly two million extra vehicle insurance policies in 2023*](#)

Asuransi Kendaraan Bermotor, *The Green Insurer*, Meluncurkan Inovasi *Carbon Offset* di Pasar Inggris

The Green Insurer, asuransi kendaraan bermotor yang berfokus pada isu keberlanjutan, baru-baru ini memasuki pasar asuransi Inggris dengan menawarkan opsi kompetitif kepada pengemudi. Perusahaan ini mendorong pelanggan untuk mengadopsi gaya berkendara ramah lingkungan dengan mengimbangi emisi karbon melalui proyek-proyek tertentu. Kebijakan ini terhubung ke aplikasi seluler yang memantau perilaku mengemudi, memberikan pelanggan wawasan tentang kesadaran lingkungan, dan menawarkan *renewal rates* dan diskon. Pendekatan inovatif ini mencakup penghargaan untuk berkendara ramah lingkungan, diskon, dan fitur aplikasi untuk memantau pengurangan emisi dan kesadaran lingkungan sebagai dampak terhadap kenaikan premi asuransi mobil.

Sumber: [*New carbon offsetting-focused motor broker launches in UK market | Insurance Times*](#)

IRDAI India Mewajibkan Biaya Tambahan bagi Perusahaan Asuransi atas Keterlambatan Penyelesaian Klaim

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) telah memperkenalkan serangkaian reformasi untuk meningkatkan perlindungan pemegang polis pada lini asuransi kesehatan. Reformasi tersebut mencakup penyelesaian klaim yang cepat dalam tiga jam dan jika

melebihi batas waktu 3 jam, apabila terdapat tambahan biaya (misalnya akibat tambahan waktu pasien di rumah sakit) maka harus ditanggung oleh asuransi. Perusahaan asuransi harus mematuhi aturan tersebut atau akan dikenakan denda. Selain itu, proses penolakan klaim harus disetujui oleh komite untuk mencegah keputusan yang sewenang-wenang. Perubahan ini bertujuan untuk membuat asuransi kesehatan lebih mudah diakses, komprehensif, dan adil bagi pemegang polis.

Sumber: [Health Insurance: IRDAI mandates additional costs for insurers on late claim settlements | Mint](#)

Reformasi Asuransi Mobil di Provinsi Ontario

Insurance Bureau of Canada (IBC), asosiasi industri yang mewakili perusahaan asuransi swasta yang menyediakan asuransi rumah, mobil, dan bisnis di Kanada, menyatakan dukungannya atas kebijakan yang diumumkan oleh Provinsi Ontario, terutama terkait reformasi asuransi mobil. Reformasi ini diantaranya meliputi peningkatan pilihan manfaat dimana konsumen mempunyai lebih banyak fleksibilitas dalam memilih jenis perawatan medis, rehabilitasi, dan manfaat lain yang bersifat opsional dan dukungan untuk mengatasi kejahatan pencurian mobil yang menyebabkan klaim asuransi mobil meningkat tajam. Pemerintah Ontario mengalokasikan anggaran sebesar \$49 juta (Rp744 miliar) untuk memerangi kasus pencurian mobil yang kian marak. Reformasi lainnya yakni peningkatan peran broker dimana broker yang akan memiliki tanggung jawab lebih dalam membantu konsumen memahami berbagai pilihan dan risiko terkait asuransi mobil.

Sumber: [IBC welcomes auto insurance reforms and investment to combat auto theft](#)

Keputusan Terbaru Mengenai Cakupan MVAIC New York

New York Motor Vehicle Accident Indemnification Corporation (MVAIC) didirikan untuk memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan kendaraan bermotor yang tidak bersalah. MVAIC membantu mereka yang terlibat dalam kecelakaan dengan kendaraan yang tidak diasuransikan, kendaraan yang dicuri, atau kasus “tabrak lari,” serta situasi di mana klaim asuransi ditolak. Perlindungan MVAIC ditujukan untuk “orang yang memenuhi syarat,” seperti penduduk New York yang tidak terlibat sebagai pelaku dalam kecelakaan, serta warga dari negara bagian yang memiliki

perjanjian dengan New York. Agar dapat mendapatkan perlindungan ini, mereka perlu mengajukan Pemberitahuan Klaim dalam waktu tertentu. MVAIC hanya akan digunakan setelah semua upaya hukum lain tidak berhasil. Keputusan pengadilan terbaru menunjukkan bahwa syarat untuk mengajukan klaim menjadi lebih mudah, sesuai dengan tujuan MVAIC untuk membantu masyarakat, namun bukti tempat tinggal tetap penting untuk kelayakan klaim.

Sumber: [*No-Fault Insurance Law Wrap-Up*](#)

Perubahan UU Asuransi Mobil di California

Mulai tahun 2025, sesuai dengan RUU Senat 1107 (UU Asuransi Mobil), batas minimum kewajiban asuransi mobil untuk kendaraan penumpang pribadi di California akan meningkat. Namun, batas cakupan untuk program mobil murah atau *California Low Cost Auto* (CLCA) tidak akan berubah. Kebijakan ini telah memengaruhi pasar asuransi, terlihat dari peningkatan 83% jumlah polis aktif pada tahun sepanjang tahun lalu. Berikut perubahan Batas Minimum Kewajiban Asuransi: (1) Cedera tubuh/kematian per orang naik dari \$15.000 menjadi \$30.000 (Rp460 juta); (2) Cedera tubuh/kematian per kecelakaan naik dari \$30.000 menjadi \$60.000 (Rp920 juta); dan (3) Kerusakan properti per kecelakaan naik dari \$5.000 menjadi \$15.000 (Rp234 juta). Bagi pengemudi berpenghasilan rendah yang tidak mampu membayar premi lebih tinggi, program CLCA dapat menjadi pilihan alternatif. Program ini menawarkan cakupan lebih rendah dengan premi yang lebih terjangkau. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen, namun juga mendorong perhatian pada program CLCA sebagai solusi untuk pengemudi dengan keterbatasan finansial.

Sumber: [*California's Low Cost Auto Insurance*](#)

Asuransi Parametrik

***African Development Bank* memberikan Fasilitas Asuransi Senilai \$1 Miliar Untuk Melindungi Jutaan Petani Di Afrika**

Fasilitas asuransi yang bernama *Africa Climate Risk Insurance Facility for Adaptation* (ACRIFA) dirancang untuk melindungi petani dan negara

terhadap kejadian bencana yang berhubungan dengan cuaca dan untuk menumbuhkan investasi sektor swasta di bidang pertanian dengan memitigasi risiko. ACRIFA diperkenalkan pada KTT Iklim Afrika yang diadakan tahun 2023 dengan menyatukan berbagai *stakeholder* mulai dari pemerintah, lembaga pembangunan, sektor asuransi, dan sektor swasta. Penerapan solusi asuransi risiko iklim dalam skala besar ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di Afrika, dan membuka peluang bisnis untuk sektor asuransi global.

Sumber: [COP 28: African Development Bank's \\$1 billion insurance facility to protect millions of farmers in Africa](#)

African Risk Capacity Menerima Bantuan Dana dari Pemerintah Belanda untuk Asuransi Parametrik di Afrika

African Risk capacity Ltd. (ARC) telah menerima kontribusi sebesar \$27 juta (Rp444,89 Miliar) dari pemerintah Belanda untuk meningkatkan ketahanan iklim di Afrika dan mempromosikan asuransi parametrik di Benua Afrika. Pendanaan ini akan dikelola melalui *Africa Disaster Risk Financing* (ADRFi) *Multi-Donor Trust Fund* milik *African Development Bank*. Asuransi parametrik memainkan peran penting dalam adaptasi perubahan iklim dan dapat memastikan bantuan keuangan yang cepat kepada masyarakat yang terkena dampak untuk pemulihan kerugian. Kemitraan ADRFi bertujuan untuk memperluas cakupan asuransi dan meningkatkan kapasitas Afrika dalam merespons guncangan terkait iklim. Kemitraan ini telah melindungi lebih dari enam juta orang di seluruh Afrika dan menerima dukungan dari Inggris, Swiss, Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, dan yang terbaru dari Belanda.

Sumber: [ARC receives \\$27m from Dutch government to further promote parametric insurance in Africa - Reinsurance News](#)

Mesir dan UNDP Bermitra untuk Melindungi Petani Melalui Asuransi Inklusif

Melalui kerja sama antara UNDP dan *Egypt Financial Regulatory Authority* (FRA), Mesir berupaya meningkatkan perlindungan keuangan bagi petani. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan asuransi inklusif dan pembiayaan risiko bencana, dengan fokus utama pada: (1) Pengembangan produk asuransi mikro yang dirancang untuk menjangkau

lebih banyak petani skala kecil. Produk ini diharapkan dapat memberikan perlindungan finansial yang efektif bagi petani terhadap risiko bencana alam yang sering terjadi; (2) Pengembangan strategi risiko bencana yang holistik, dengan memperhatikan ancaman iklim yang terus meningkat dan dampaknya terhadap sektor pertanian. UU Perasuransian yang baru di Mesir menjadi tonggak penting dalam mendukung petani. Kebijakan ini mencakup dukungan terhadap asuransi mikro untuk menjangkau petani kecil dan perlindungan terhadap risiko terkait iklim seperti kekeringan dan hama. Namun, masih terdapat tantangan diantaranya yakni belum adanya strategi pembiayaan terhadap risiko bencana yang lebih formal.

Sumber: [How Egypt and UNDP are working to protect farmers and crops with inclusive insurance.](#)

Asuransi Kesehatan

AS Menyelesaikan Aturan Perluasan Akses Data Kesehatan dan Proses *Prior Authorization* Perusahaan Asuransi

Pemerintah Amerika Serikat melalui *The Centers for Medicare & Medicaid Services* (CMS) baru saja mengeluarkan aturan untuk penyederhanaan proses *Prior Authorization* oleh perusahaan asuransi dalam prosedur persetujuan perawatan medis. Aturan ini menyederhanakan lamanya proses menjadi 2x lebih cepat. Selain itu, apabila terdapat penolakan dari perusahaan asuransi, maka harus menyertakan alasan secara spesifik. Dengan penerapan tersebut, diperkirakan akan menghasilkan efisiensi biaya praktik dokter dan rumah sakit lebih dari \$15 miliar (Rp237 triliun) dalam 10 tahun. Selain itu, CMS juga menyelesaikan *Application Programming Interface* (API) untuk meningkatkan pertukaran data asuransi kesehatan dan mendorong efisiensi sistem layanan kesehatan untuk semua.

Sumber: [CMS Finalizes Rule to Expand Access to Health Information and Improve the Prior Authorization](#)

Pengetatan Persyaratan Asuransi Kesehatan bagi WNA di Korea

Amandemen Undang-Undang Asuransi Kesehatan Korea Selatan yang mulai berlaku pada tanggal 3 April 2024, menerbitkan aturan baru bagi warga negara asing dan warga Korea Selatan di luar negeri yang mencari

perlindungan asuransi kesehatan di Korea Selatan. Untuk memenuhi syarat sebagai peserta asuransi kesehatan nasional, maka perlu tinggal di Korea Selatan minimal selama 6 (enam) bulan. Pengecualian diberikan bagi anak-anak di bawah usia 19 tahun dan pasangan pekerja asing. Pengetatan kriteria kelayakan asuransi kesehatan ini dilakukan sebagai respon terhadap kekhawatiran bahwa banyak warga negara asing yang tinggal dalam waktu singkat, namun dapat memanfaatkan sistem kesehatan dengan membayar biaya yang rendah untuk perawatan medis yang mahal. Sumber: [Stricter insurance requirements for foreigners in Korea to be implemented in April](#)

Reformasi Layanan Kesehatan Afrika Selatan dalam Ketidakpastian Pasca Pemilu

Afrika Selatan sedang menghadapi momen penting dalam reformasi sistem kesehatan yakni penandatanganan UU *National Health Insurance* (NHI) pada Mei 2024 dan tantangan implementasi UU ini pasca Pemilu di Juni 2024 dimana *African National Congress* (ANC) gagal mempertahankan mayoritas kursi di parlemen. Dua minggu sebelum Pemilu, Presiden menandatangani UU NHI yang bertujuan untuk menyediakan cakupan kesehatan universal. UU ini dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki ketimpangan layanan kesehatan dimana sektor publik melayani 84% dari populasi, sementara selebihnya mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik melalui asuransi swasta. UU NHI bertujuan untuk mengurangi peran asuransi swasta, membentuk dana publik untuk akses layanan kesehatan gratis, dan mengatur biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan kesehatan swasta. Namun, partai oposisi utama, *Democratic Alliance*, mengkritik UU ini karena gagal menangani masalah sistemik yang lebih mendalam dalam sektor kesehatan. Para kritikus, termasuk tenaga kesehatan, berpendapat bahwa UU ini akan menguras keuangan negara, membatasi pilihan pasien, dan berpotensi mendorong tenaga medis keluar dari Afrika Selatan.

Sumber: [South Africa's president signs major health bill just before election | Reuters](#)
[South Africa's Health-Care Reform in Limbo Following Election](#)

Asuransi Perjalanan

Thailand Meluncurkan Skema Baru Perlindungan Asuransi Bagi Wisatawan Asing

Pemerintah Thailand memperkenalkan skema baru asuransi kesehatan bagi wisatawan asing yang disebut *Thailand Traveller Safety* atau skema Keamanan Wisatawan Thailand. Melalui skema tersebut, pemerintah akan menanggung biaya pengobatan hingga 500 ribu baht atau senilai Rp210 juta dan kompensasi hingga 1 juta baht atau senilai Rp420 juta jika meninggal dunia (wisatawan tidak membayar premi khusus). Inisiatif ini berlangsung sejak 1 Januari hingga 31 Agustus 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan wisatawan asing saat mengunjungi Thailand. Hal tersebut dilakukan untuk menarik wisatawan ke Thailand yang melemah sejak pandemik COVID-19. Melalui inisiatif ini, Pemerintah Thailand memiliki target wisatawan mencapai 35 juta pengunjung pada tahun 2024 dengan target pendapatan sebesar US\$55 miliar atau Rp23,92 triliun.

Sumber: [*Thailand to provide up to US\\$14,000 in medical insurance coverage for tourists*](#)

Asuransi Syariah

Filipina Mulai Mengembangkan Asuransi Syariah untuk Memperdalam Penetrasi Asuransi

The Insurance Commission (IC) Filipina pada awal Februari 2024 telah menandatangani MoU dengan Departemen Anggaran tentang *Takaful Insurance*. MoU ini merupakan salah satu upaya IC untuk mulai mempelajari proses dan kebijakan terkait asuransi syariah. Beberapa perusahaan asuransi juga sedang mempelajari potensi penawaran produk asuransi syariah bagi masyarakat muslim Filipina. Selain melalui pengembangan asuransi syariah, Filipina juga sedang menyusun RUU bidang keuangan yang akan memasukkan aspek literasi keuangan pada kurikulum SMA yang salah satunya meliputi tema asuransi. Menurut survei inklusi keuangan *Bangka Sentral ng Pilipinas*, jumlah orang dewasa yang memiliki asuransi pada tahun 2021 baru sebesar 17% menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 23%.

Sumber: [*Islamic insurance seen helping deepen Philippine product penetration*](#)

Asuransi Sosial

Rekomendasi atas Penerapan UU Asuransi Sosial di Tiongkok

The Standing Committee of the National People's Congress baru saja meninjau penerapan Undang-Undang Asuransi Sosial. Peninjauan ini melibatkan 19 anggota komite yang mengunjungi 16 kota di 6 provinsi. Laporan peninjauan menunjukkan kemajuan besar dalam perluasan cakupan asuransi sosial dimana lebih dari 1 miliar orang terdaftar dalam berbagai skema asuransi, termasuk pensiun, perawatan kesehatan, dan pengangguran. Namun, terdapat beberapa tantangan utama yakni: (1) Banyak pekerja informal dengan pekerjaan tidak tetap yang belum terdaftar dalam program asuransi; (2) Beberapa perusahaan gagal memenuhi kewajiban mereka untuk membayar kontribusi asuransi bagi karyawannya; dan (3) Kekhawatiran terkait pengelolaan dan keamanan dana asuransi sosial, termasuk risiko penipuan dan investasi. Laporan kongres menekankan pentingnya reformasi dan pengelolaan yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan sistem asuransi sosial, yang menjadi salah satu pilar utama kesejahteraan masyarakat di Tiongkok.

Sumber: [Recommendations made for strict implementation of China's Social Insurance Law - Chinadaily.com.cn](https://www.chinadaily.com.cn)

PAYDI

Regulator Asuransi Italia Merancang Peraturan Baru mengenai Produk Asuransi *Unit-Linked*

Regulator Asuransi Italia, *The Institute for the Supervision of Insurance* (IVASS), baru saja meluncurkan konsultasi publik kedua mengenai rancangan peraturan mengenai produk asuransi *unit-linked* dan *indeks-linked*. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya masukan yang disampaikan masyarakat terhadap konsultasi publik sebelumnya pada tahun 2022. Topik-topik yang mendapatkan komentar dari masyarakat yaitu (i) perpanjangan ruang lingkup peraturan terhadap perusahaan asuransi Uni Eropa yang memasarkan polis sejenis di Italia; (ii) penyesuaian aturan yang mengatur batasan investasi aset yang mendasari kebijakan *unit-linked* dengan peraturan skema investasi yang

diakui di seluruh Uni Eropa; (iii) peraturan mengenai biaya dan biaya pengelolaan dalam hal dana diinvestasikan pada *collective investment*; dan (iv) peraturan mengenai cakupan risiko demografis.

Sumber: [*IVASS consults again to review the regulatory framework governing unit and index linked products*](#)

Cross Border Operation

Kayna, Perusahaan *Insurtech* asal Irlandia akan Memasuki Pasar UKM di Amerika dan Inggris

Perusahaan Kayna (kayna.io) merupakan *platform insurtech* yang terdaftar di Irlandia dan berdiri tahun 2021. Kayna baru saja mendapatkan tambahan pendanaan sebesar €1 juta (16 miliar) untuk memperluas bisnis ke Amerika Serikat dan Inggris. *Kayna* akan fokus memperluas pangsa pasarnya pada UKM yang belum terlayani jasa asuransi. Menurut data Kayna, sekitar 40% UKM di Amerika Serikat tidak memiliki asuransi dan 28% UKM di Inggris akan gulung tikar jika dihadapkan pada tagihan tak terduga. Kayna memiliki *platform data* yang memungkinkan perusahaan untuk mendistribusikan produk asuransinya kepada calon nasabah yang relevan. Pada sisi yang lain, calon nasabah akan mendapatkan data yang akurat, premi dan kebutuhan asuransi yang sesuai dengan didukung oleh proses yang seluruhnya terotomatisasi baik pada saat pendaftaran premi sampai pada pengajuan klaim.

Sumber: [*Kayna, the insurtech set to revolutionize small business insurance, raises €1 million*](https://kayna.io/) | <https://kayna.io/>

Stress Test

The Prudential Regulation Authority (PRA) Inggris akan Melaksanakan Stress Test Asuransi Umum pada Tahun 2025

Prudential Regulation Authority (PRA) Bank Of England berencana untuk melakukan *stress test* pada asuransi umum di tahun 2025. Pelaksanaan *stress test* ini akan menjawab kebutuhan atas hasil *stress test* sebelumnya di tahun 2022 dan akan menggunakan beberapa simulasi skenario buruk yang terjadi. PRA akan melibatkan industri termasuk asosiasi asuransi

umum untuk *stress test* ini pada paruh pertama tahun 2024. Tujuan pelaksanaan *stress test* antara lain untuk menilai solvabilitas dan ketahanan likuiditas industri, menilai efektivitas manajemen risiko perusahaan, dan menginformasikan tanggapan dari PRA atas skenario buruk yang mungkin terjadi.

Sumber: [PRA statement on the dynamic general insurance stress test in 2025 | Bank of England](#)

Program Penjaminan Polis

Regulator Asuransi Negara Bagian Colorado Mewajibkan Perusahaan Asuransi Jiwa Membayar lebih dari \$52 Juta kepada Konsumen

Colorado Division of Insurance (DOI) yang merupakan bagian dari *Department of Regulatory Agencies* (DORA), telah melakukan investigasi dan kemudian mewajibkan pembayaran klaim kepada konsumen sebesar lebih dari \$52 juta (Rp816 Miliar) dalam bentuk manfaat asuransi jiwa. DOI memastikan nasabah asuransi jiwa menerima manfaat yang awalnya ditolak oleh perusahaan asuransi. DOI juga melakukan investigasi dari rekam medis yang sebelumnya ditolak Perusahaan. Selain itu, DOI juga mengharuskan perusahaan asuransi membayar bunga tambahan akibat adanya keterlambatan pembayaran manfaat polis tersebut.

Sumber: [Division of Insurance recovers over \\$52 million in life insurance benefits for Coloradans](#)

Program Jaminan Polis Asuransi di Prancis

Prancis telah sejak lama menyiapkan program jaminan polis asuransi untuk menangani kebangkrutan perusahaan asuransi. *Fonds de Garantie des Victimes* (FGAO) sejak 1951 dan *Fonds de Garantie des Assurances de Personnes* (FGAP) sejak 1999. FGAO awalnya didirikan hanya untuk program asuransi wajib seperti motor insurance atau *Third Party Liability* untuk memberikan kompensasi ketika perusahaan asuransi bangkrut. Namun FGAO berkembang menjadi program jaminan untuk asuransi non-jiwa. FGAO tidak bergantung pada alokasi anggaran negara, namun dibiayai oleh kontribusi dan biaya dari polis asuransi. Sementara, FGAP berfungsi untuk melindungi pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi jiwa. FGAP mulai bekerja di saat ada penunjukan

oleh *French Prudential Supervision and Resolution Authority (ACPR)*.

Sumber: [Guarantee funds in France](#)

Peran PCF Kenya sebagai *Safety Net* Bagi Pemegang Polis Asuransi

The Policyholders Compensation Fund (PCF) Kenya efektif beroperasi pada tahun 2005. PCF memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemegang polis asuransi dilindungi meskipun perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan. PCF saat ini sedang melakukan program sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik dan memfasilitasi proses kompensasi secara efisien, mengikuti amandemen UU Asuransi di tahun 2023 untuk menyederhanakan prosedur kompensasi bagi kegagalan perusahaan asuransi. PCF memiliki peran sebagai *safety net* bagi pemegang polis sehingga jika perusahaan asuransi gagal, pemegang polis dapat mengajukan klaim kepada PCF. Perusahaan asuransi di Kenya diatur oleh *Insurance Regulatory Authority (IRA)* dan harus memenuhi persyaratan modal yang ketat sebelum beroperasi dan setiap pelanggaran dapat mengakibatkan penangguhan atau pembatalan lisensi.

Sumber: [You have safety nets in case your insurance company goes under, PCF tells Kenyans](#)

Perubahan Kebijakan

Bank Negara Malaysia (BNM) Memperbarui Kerangka Peraturan Asuransi

BNM baru saja mengumumkan hasil konsultasi publik terkait dengan konsep *Licensing and Regulatory Framework for Digital Insurers and Takaful Operators (DITO Framework)* yang diterbitkan pada bulan November 2022 lalu. Selama masa konsultasi, lebih dari 50 pemangku kepentingan telah menyampaikan masukan atas konsep tersebut. Dalam penyempurnaan aspek kerangka kebijakan asuransi digital ini, BNM akan menyempurnakan kebijakan untuk memberikan kejelasan bagi model bisnis asuransi yang baru dan inovatif seperti *embedded insurance* dan *insurance as a service* (asuransi sebagai layanan). BNM berencana menyelesaikan kebijakan baru tersebut pada paruh pertama tahun 2024.

Sumber: [BNM publishes update on insurance regulatory framework | Outcome of Public Consultation on Exposure Draft on Licensing and Regulatory](#)

Negara Bagian Louisiana Mengamandemen Undang-Undang Asuransi untuk Mengatasi Krisis Asuransi

Louisiana, sebuah negara bagian di Amerika Serikat tengah mengamandemen undang-undang asuransi dalam rangka untuk mengatasi krisis asuransi dan RUU ini telah disetujui oleh Komite Asuransi di badan legislatif untuk dibahas lebih lanjut. Setelah terjadinya bencana badai di 2020 dan 2021, Louisiana mengalami krisis asuransi yaitu beberapa perusahaan asuransi mengalami kegagalan keuangan, perusahaan asuransi tidak lagi menerbitkan polis asuransi untuk bencana badai dan hujan es, dan peningkatan tarif premi asuransi properti yang cukup tinggi. RUU tersebut akan memperbolehkan perusahaan asuransi untuk menaikkan tarif secara lebih mudah untuk meningkatkan profit. RUU yang dirancang agar lebih ramah industri ini diharapkan akan mendatangkan banyak pemain baru yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penurunan premi asuransi.

Sumber: [Big changes are coming to try and fix Louisiana's insurance crisis | Insurance reform legislation advances in the legislature \(msn.com\)](#)

IRDAI melakukan Amandemen Peraturan untuk Mengembangkan Industri Asuransi dan Reasuransi di India

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) melakukan perubahan peraturan untuk mendorong industri asuransi India menuju efisiensi dan efektivitas yang mengarah ke visi “*Insurance for All*” pada tahun 2047. Peraturan yang mengonsolidasi 34 peraturan ini mencakup 8 (delapan) prinsip seperti ketentuan penjaminan polis, tanggung jawab sektor pedesaan dan sosial, pasar asuransi elektronik, produk asuransi dan pengelolaan kantor cabang reasuransi asing, aspek pendaftaran, aktuarial, keuangan, investasi dan tata kelola perusahaan. Konsolidasi peraturan ini merupakan kelanjutan dari amandemen peraturan terkait reasuransi pada tahun 2023 lalu yang ditujukan untuk menjadikan India sebagai hub bagi reasuransi global.

Sumber: [IRDAI makes regulation changes to develop India's reinsurance sector](#)

Singapore Mengamandemen UU Asuransi terkait Kewenangan Menteri Komunitas dalam Transaksi Perusahaan Asuransi berbentuk Koperasi

Parlemen Singapura mengesahkan undang-undang baru pada 16 Oktober 2024, yang memungkinkan Menteri Komunitas untuk mempertimbangkan kepentingan publik dalam persetujuan transaksi asuransi koperasi, seperti dalam kasus rencana akuisisi Income Insurance oleh Allianz. Banyak anggota parlemen mengungkapkan kekhawatiran bahwa intervensi pemerintah dalam transaksi asing dapat merusak citra Singapura sebagai pusat bisnis yang pro-investasi dan berbasis aturan. Partai Buruh mengkritik undang-undang ini karena dianggap mengurangi kepastian hukum bagi investor. Kementerian Keuangan Singapura memastikan bahwa perubahan ini hanya berlaku untuk asuransi koperasi demi menjaga misi sosialnya, dan tidak akan memengaruhi sektor keuangan lainnya. Pemerintah menegaskan Singapura tetap komit pada transparansi dan aturan yang jelas bagi investor.

Sumber: [Singapore: Law changed to allow views of Community Minister to be considered in deals involving co-op-related insurers](#)

India Merevisi UU Asuransi untuk Meningkatkan FDI dan Mengurangi Modal Minimum

Pemerintah India berencana merevisi UU Asuransi tahun 1938 untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi di sektor asuransi. Salah satunya dengan peningkatan batas investasi asing langsung (FDI) dari 74% menjadi 100%. Langkah ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi investor global untuk berkontribusi dalam pertumbuhan sektor asuransi domestik. Selain itu, pemerintah berencana menghapus syarat modal minimum sebesar ₹100 crore (Rp186 miliar) untuk perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kesehatan. Sebagai gantinya, IRDAI akan menetapkan persyaratan modal berdasarkan kategori perusahaan dan rencana bisnis masing-masing. Kebijakan ini juga mencakup pengurangan modal minimum untuk cabang reasuransi asing dari ₹100 crore menjadi ₹50 crore (Rp93 miliar), guna menarik lebih banyak perusahaan ke pasar India. Reformasi lain meliputi pengenalan lisensi gabungan yang memungkinkan perusahaan beroperasi di berbagai segmen, pengaturan yang memungkinkan agen asuransi bermitra dengan banyak perusahaan,

pengakuan pembayaran premi secara *online*, dan revisi ketentuan merger perusahaan asuransi.

Sumber: [Insurance industry welcomes Finance Ministry's reform proposals, including raising FDI limit to 100%, seeking stakeholder feedback for amendments. - The Hindu BusinessLine](#)

Vietnam Melakukan Amandemen UU Asuransi Sosial

Pemerintah Vietnam baru saja melakukan amandemen UU Asuransi Sosial (*Social Insurance Law*) sebagai bentuk reformasi pada sistem asuransi sosial. UU ini bertujuan untuk menyelaraskan praktik di lapangan dan memperluas manfaat bagi peserta, khususnya bagi pekerja Vietnam di luar negeri dan pekerja asing di Vietnam. Perubahan utama meliputi perluasan cakupan Asuransi Sosial Wajib, peraturan baru tentang pengumpulan premi asuransi sosial, pengenalan *reference level* (yakni jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar perhitungan pembayaran manfaat) untuk perhitungan, dan penyederhanaan prosedur administrasi. UU ini juga memperkenalkan *social pension* yang dijamin negara dan pedoman khusus untuk pengelolaan dananya. Pemberi kerja harus mematuhi kewajiban baru ini, termasuk penyertaan pekerja paruh waktu dan pekerja lepas dalam Asuransi Sosial Wajib. Secara keseluruhan, UU ini mendorong kerangka asuransi sosial yang lebih komprehensif dan modern di Vietnam.

Sumber: [Vietnam's 2024 Social Insurance Law: Implications for Businesses](#)

Fraud dan Perlindungan Industri

Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi Disabilitas di Amerika Serikat

The United States Social Security Administration (SSA) saat ini menghadapi tantangan dalam mencegah, mendeteksi, dan melakukan pemulihan atas kerugian kelebihan pembayaran program asuransi disabilitas. Di Amerika Serikat, individu dapat menerima manfaat asuransi jika disabilitasnya menghalangi mereka untuk bekerja. Namun, jika mereka kembali bekerja dan SSA tidak menyesuaikan tunjangannya, maka mereka akan dibayar lebih dari ketentuan program. Studi yang dilakukan SSA menemukan bahwa 71% penerima manfaat memiliki pendapatan di atas batas program

dan kelebihan pembayaran berlangsung rata-rata selama 9 bulan dan mencapai sebesar \$9,282 (Rp146 juta) per penerima manfaat. Total kelebihan pembayaran ini mencapai \$755 million (Rp12 triliun).

Sumber: [*Disability Insurance: SSA Faces Ongoing Challenges with Overpayments* | U.S. GAO](#)

Coalition Against Insurance Fraud: Kerugian Akibat Fraud Asuransi Mencapai Rp4.811 Triliun Setiap Tahun di Amerika Serikat.

Coalition Against Insurance Fraud (CAIF) adalah sebuah koalisi di Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1993 dan beranggotakan sekitar 300 organisasi. Koalisi ini merupakan satu-satunya aliansi yang menyatukan semua kelompok dari organisasi konsumen, perusahaan asuransi, lembaga pemerintah, legislator, jaksa dan *stakeholder* lain untuk melawan penipuan di sektor asuransi. CAIF melakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat, melakukan advokasi UU anti *fraud*, melakukan penelitian untuk mengetahui metode-metode *fraud* dan usaha untuk memeranginya, sampai advokasi litigasi di pengadilan. Tahun ini, CAIF melaporkan bahwa kerugian sektor asuransi setiap tahunnya akibat *fraud* sebesar \$308.6 billion (Rp4.811 triliun). CAIF juga menyediakan berbagai saluran pelaporan untuk melaporkan *fraud* termasuk bekerjasama dengan *National Insurance Crime Bureau*.

Sumber: [*Coalition Against Insurance Fraud*](#)

Implementasi IFRS 17

Banyak Perusahaan Asuransi di Korea Selatan yang Dijual Setelah Adanya Penyesuaian Penilaian Berdasarkan IFRS 17

ABL Life Insurance merupakan salah satu perusahaan asuransi di Korea Selatan yang berdiri sejak tahun 1954. *ABL Life Insurance* gagal mendapatkan pemegang saham baru dikarenakan calon pembelinya menarik diri dari kesepakatan penjualan. Selain *ABL Life*, banyak perusahaan asuransi lainnya termasuk *KDB Life* dan *MG Non-life Insurance*, yang bersiap untuk dijual. Pengamat pasar mengatakan standar akuntansi IFRS 17 yang baru diperkenalkan, berperan dalam menghambat penjualan perusahaan asuransi. Dalam IFRS 17, terdapat penyesuaian dalam perhitungan *Contractual Service Margin* (CSM),

yang menyebabkan penurunan tajam keuntungan perusahaan asuransi dan membuat valuasi perusahaan semakin menurun.

Sumber: [More insurance firms go up for sale after valuation adjustments](#)

Cross Border Investment

Zurich Insurance Berinvestasi Senilai Rp7,6 Triliun pada Asuransi di India setelah Perubahan Kebijakan Kepemilikan Asing

Zurich Insurance Group akan membeli 51% saham di unit asuransi umum *Kotak Mahindra Bank* (<https://www.kotak.com/en/home.html>) dengan harga sekitar 40,51 miliar rupee (Rp7,62 triliun). Investasi ini akan memberikan Zurich pijakan di pasar asuransi India yang berkembang pesat. Pada tahun 2021, India melonggarkan batasan investasi luar negeri di sektor asuransi, sehingga memungkinkan akuisisi saham mayoritas hingga 74% dimana sebelumnya hanya diizinkan sebesar 49%. Investasi ini akan menjadi investasi terbesar yang dilakukan oleh perusahaan asuransi global pada perusahaan asuransi non-jiwa di India. Hal tersebut mendorong harga saham Kotak sebanyak 2% menjadi Rp 1.758,65.

Sumber: [Zurich Insurance bets on India with \\$487 mln stake in Kotak arm | Reuters](#)

Dukungan Investasi Asing terhadap Sektor Asuransi Umum Vietnam

Tingkat penetrasi asuransi di Vietnam yang tergolong rendah membuka peluang bagi investor asing untuk terlibat dalam pasar asuransi Vietnam. Transaksi investasi asing yang terjadi lebih banyak kepada pasar asuransi umum dibandingkan pasar asuransi jiwa. Sebagai contoh, *Korea's DB Insurance Co., Ltd* (DBI) membeli saham *Vietnam National Aviation Insurance JSC* (VNI) dan *Saigon - Hanoi Insurance* (BSH) sebesar masing-masing 75%. Investor asing lainnya yang turut serta seperti *Pyn Elite Fund VPBank*, dan *TASCO*. Asuransi kesehatan dan asuransi kendaraan bermotor merupakan dua produk penyumbang pendapatan premi asuransi umum terbesar. Sektor asuransi jiwa di Vietnam mengalami kelesuan sejak beberapa tahun terakhir, sementara sektor asuransi umum tumbuh dan cukup menarik investor asing.

Sumber: [Foreign capital strongly pours into VN non-life insurance market](#)

Sustainable Finance

APRA Mendorong Perusahaan Asuransi untuk Menggunakan *Insurance Linked Securities (ILS)*

Australian Prudential Regulation Authority (APRA) mendorong perusahaan asuransi untuk memperluas strategi manajemen risiko mereka dengan menggunakan reasuransi alternatif, seperti obligasi bencana alam (*catastrophe bonds*) dan *Insurance Linked Securities (ILS)*. Inisiatif ini dirancang untuk melengkapi penggunaan reasuransi tradisional dan meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap risiko besar, termasuk bencana alam yang dapat mengancam stabilitas keuangan. Dalam konteks perhitungan *Insurance Concentration Risk Charge (ICRC)*, APRA mengakui ILS sebagai alat penting yang dapat membantu perusahaan asuransi mengelola eksposur risiko konsentrasi mereka dengan lebih efektif. Penggunaan ILS memungkinkan transfer risiko asuransi kepada investor pasar modal, menciptakan diversifikasi yang lebih baik dalam manajemen risiko dan mengurangi ketergantungan pada kapasitas reasuransi tradisional.

Sumber: [*APRA's reinsurance requirements and the use of insurance linked securities*](#)

Asosiasi Asuransi Tiongkok Menerbitkan Panduan *Disclosure ESG Perdana* untuk Industri Asuransi

Panduan ini menandai langkah pertama dalam regulasi industri asuransi Tiongkok yang khusus difokuskan pada aspek *disclosure ESG (Environmental, Social, and Governance)*. Inisiatif ini berasal dari Asosiasi Asuransi Tiongkok, dengan dukungan dari perusahaan asuransi terkemuka, Ping An. Dokumen panduan ini memberikan standar bagi perusahaan asuransi untuk mengungkapkan informasi ESG melalui 72 indikator yang terbagi dalam 2 Tingkatan. Panduan ini merujuk pada standar ESG internasional, termasuk *Global Reporting Initiative (GRI)* dan *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, sambil juga mempertimbangkan karakteristik unik yang dimiliki oleh pasar asuransi Tiongkok. Selain itu, panduan mencakup persyaratan pengungkapan terkait revitalisasi pedesaan, produk asuransi berkelanjutan, dan investasi ramah lingkungan.

Sumber: [*The First ESG Disclosure Guidance for China's Insurance Industry Released With Significant Contributions from Ping An*](#)

Jepang Persiapkan Industri Reasuransi Domestik Menanggung Dampak Kerugian Gempa Bumi

Menurut lembaga pemeringkat kredit di Amerika Serikat (AM Best/web.ambest.com), gempa bumi yang terjadi di Jepang pada tanggal 1 Januari 2024 diperkirakan akan menyebabkan kenaikan tarif premi reasuransi pada 1 April mendatang. Perkiraan tersebut didasarkan apabila kerugian industri domestik melebihi proporsional *excess-of-loss*. Hal ini disebabkan karena penerapan skema reasuransi di Jepang bersifat konservatif yang mentransfer risiko ke pasar reasuransi internasional. Menjawab hal tersebut pemerintah Jepang akan mendukung skema reasuransi yang dikelola oleh perusahaan reasuransi domestik dengan kenaikan tarif premi tersebut.

Sumber: [Upward price pressure possible at April renewals following Japan quake: AM Best - Reinsurance News | AM Best: Dampak Kerugian Gempa Jepang Dapat Dikelola Perusahaan Asuransi Lokal](#)

Literasi dan Inklusi Asuransi

MAS Singapura Akan Permudah Syarat Pengajuan Asuransi Tertentu

The Monetary Authority of Singapore (MAS) berupaya mempermudah persyaratan pengajuan asuransi bagi calon pemegang polis. Hal ini dilakukan dengan mengurangi jumlah informasi yang dihimpun perusahaan asuransi untuk polis tertentu. Upaya ini merupakan bagian dari kolaborasi MAS dengan *MoneySense*, *Central Provident Fund Board*, dan berbagai asosiasi industri keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat Singapura melalui *The Basic Financial Planning Guide*. Panduan yang diluncurkan akhir tahun lalu ini memberikan panduan keuangan sederhana termasuk berapa dari jumlah pendapatan yang perlu dialokasikan untuk asuransi. Dengan membatasi informasi yang dibutuhkan dari konsumen, hal ini diharapkan dapat mempermudah konsumen mendapatkan produk asuransi yang sederhana dan terjangkau sesuai dengan rekomendasi dalam panduan tersebut.

Sumber: [MAS Plans to Ease Insurance Application with Less Data Collection](#)

Agen dan Distribusi Produk Asuransi

Jaringan *Point of Sales Person* (PoSP) mendukung Pasar Asuransi di India Mengalami Pertumbuhan Tercepat di Dunia

Tingkat pertumbuhan industri asuransi di India meningkat selama dua dekade terakhir yakni pendapatan premi asuransi umum meningkat sebesar 17,9% untuk Q1 2024 dan pendapatan premi asuransi jiwa sebesar 35% pada Q1 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 20%. Pertumbuhan premi pada asuransi umum terjadi karena tingginya permintaan atas produk asuransi kesehatan dan kendaraan bermotor. Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan pasar asuransi tersebut yaitu demografi India yang didominasi kaum muda dan populasi bekerja, perluasan ekspansi kepada kelas menengah, kemajuan teknologi, munculnya jaringan *agen Point of Salespersons* (PoSP) dalam pemasaran asuransi yang memungkinkan penjualan lintas perusahaan asuransi, dan peningkatan pemasaran asuransi ke daerah pedesaan.

Sumber: [*India is the fastest growing insurance market in the world!*](#)

Rencana IRDAI India untuk Mengubah Struktur Komisi untuk Agen Asuransi Jiwa

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) akan mengumumkan struktur komisi baru untuk asuransi jiwa pada bulan Juni 2024 yang bertujuan untuk mengurangi komisi di muka yang besar dan meningkatkan komisi tambahan. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan persistensi kebijakan, mengurangi biaya bagi perusahaan asuransi, dan memberikan nilai pengembalian yang lebih baik serta premi yang lebih rendah bagi pemegang polis. Saat ini, agen asuransi menerima sebagian besar komisi mereka pada tahun pertama polis. Perubahan yang diantisipasi oleh IRDAI merupakan langkah menuju pemerataan struktur komisi, menyelaraskan insentif agen dengan kepentingan jangka panjang pemegang polis dan perusahaan asuransi.

Sumber: [*Life Insurance: New commission structure soon? What's IRDAI planning*](#)

Perundingan Dagang Internasional

Uni Eropa Meminta Indonesia Meningkatkan Penawaran Pada Perundingan IEU-CEPA

Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) telah memasuki putaran ke-17 dan akan dilakukan putaran ke-18 pada tanggal 14 Mei 2024 di Brussel, Belgia. Pihak EU meminta Indonesia merevisi tawaran untuk sektor jasa termasuk sektor jasa keuangan (SJK) dengan tenggat waktu 15 April 2024. EU meminta Indonesia untuk menghapuskan batas kepemilikan asing di sektor perbankan dan perasuransian, menghapuskan pembatasan terhadap kantor cabang baik di sektor perbankan dan perasuransian, pembukaan *cross-border supply* untuk asuransi *Marine, Aviation, and Transit* (MAT), dan untuk mengizinkan kategori Manager bagi tenaga kerja asing sektor asuransi. Pihak UE menginginkan perlakuan yang sama dari Indonesia pada perjanjian *ASEAN Framework Agreement on Services* paket ke-9 (AFAS-9) dimana Indonesia telah mengizinkan *cross-border supply* untuk asuransi MAT antar negara ASEAN.

Sumber: Catatan Tim Perunding OJK pada Pembahasan Indonesia - European Union CEPA

Sertifikasi dan Pelatihan Pengawas Asuransi

Sertifikasi dan Pelatihan Pengawas Asuransi *Monetary Authority of Singapore* (MAS)

Pengawas asuransi pada *Monetary Authority of Singapore* (MAS) mengikuti kursus atau ujian eksternal yang diselenggarakan oleh *Singapore College of Insurance* (SCI) sebagai bagian dari sertifikasi dan pelatihan bagi pengawas. Beberapa *subject* yang dapat diambil yaitu: Skema Investasi Kolektif, Asuransi Jiwa dan Polis Terkait Investasi, Sertifikasi Asuransi Umum, Sertifikat Reasuransi, dan Sertifikasi Asuransi Kesehatan. SIC juga menawarkan program diploma seperti Diploma Asuransi Umum dan Manajemen Risiko dan Diploma Asuransi Jiwa. MAS tidak memiliki *in-house certification program* khusus untuk pengawas asuransi, namun mengembangkan program pelatihan tentang topik-topik tertentu seperti:

pengawasan keuangan, penilaian dampak dan risiko lembaga keuangan, *valuation & capital regulations*, manajemen risiko perusahaan, *stress test*, *on-site supervision*, APU/PPT dan fungsi asuransi khusus misalnya manajemen reasuransi.

Sumber: Korespondensi OJK PPDP melalui email dengan MAS

Sertifikasi dan Pelatihan Pengawas Asuransi *Office of Insurance Commission (OIC) Thailand*

Pengawas sektor asuransi di Thailand, *Office of Insurance Commission*, memiliki program sertifikasi internal utama yang disebut *Insurance Supervisory Curriculum (ISC)*. Program ini dilaksanakan secara daring dengan *media e-Learning*. Program ini dirancang khusus untuk memberikan wawasan terkait asuransi yang diperlukan bagi pengawas asuransi tingkat pemula. Topik utama yang dibahas dalam kurikulum ini diantaranya adalah: Pengantar Asuransi dan Manajemen Risiko; Prinsip Akuntansi dalam Konteks Asuransi; Undang-Undang dan peraturan terkait Asuransi; Pengantar Ekonomi Makro; dan Pengantar *Insurance Core Principles (ICPs)*. Program sertifikasi ini biasanya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 45 hari dan seluruh peserta harus melakukan *Pre Test* dan *Post Test*.

Sumber: Korespondensi OJK PPDP melalui email dengan OIC

Pelatihan Pengawas Asuransi *Financial Services Agency (FSA) Jepang*

FSA tidak memiliki sertifikasi khusus bagi pegawai yang menjalankan tugas pengawasan. Mutasi pegawai antar sektor sangat sering dilakukan sehingga tidak ada kurikulum khusus yang ditetapkan bagi pegawai tertentu. Dalam melakukan rekrutmen, FSA juga tidak memiliki kategori rekrutmen khusus untuk “pengawasan perbankan” atau “pengawas asuransi”, karena semua pegawai memiliki kemungkinan untuk ditugaskan ke departemen manapun. Namun, dalam reformasi FSA yang dilakukan sejak 2017, FSA memiliki pelatihan untuk kepemimpinan serta evaluasi 360 derajat. FSA juga mendorong setiap pegawainya untuk pengembangan diri termasuk keikutsertaan pelatihan yang berkelanjutan.

Sumber: Korespondensi OJK PPDP melalui email dengan FSA Jepang

Database Polis dan Klaim

Data APRA Menunjukkan Kenaikan Biaya yang Tinggi pada Sektor Asuransi

The Australian Prudential Regulation Authority (APRA) baru saja merilis statistik *National Claims and Policies Database* (NCPD) 2023. NCPD didirikan oleh APRA pada tahun 2003 atas permintaan Pemerintah dengan konsultasi dari industri asuransi dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan NCPD adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada perusahaan asuransi, masyarakat, serta pemerintah negara bagian dan federal tentang asuransi serta untuk memantau tren premi dan biaya klaim. Laporan Statistik NCPD 2023 menyoroti peningkatan signifikan dalam premi dan biaya klaim untuk asuransi *professional indemnity* (PI) dan *public and product liability* (PL). Premi *public liability* meningkat sebesar 40% sejak 2015, didorong oleh histori klaim cedera yang memburuk. Premi *professional indemnity* meningkat sebesar 27%, dengan entitas korporat mengalami kenaikan tertinggi. Asuransi Tanggung Gugat untuk Direktur dan Pejabat Perusahaan (D&O) juga mengalami lonjakan klaim di atas \$1 juta atau meningkat tiga kali lipat. Tren ini terutama berdampak pada industri seperti konstruksi, ritel, dan pertambangan, yang menekankan perlunya analisis data yang berkelanjutan untuk memandu strategi asuransi di masa mendatang.

Sumber: [Public liability and professional indemnity insurance face soaring costs. APRA data shows | National Claims and Policies Database | APRA](#)

Standar Internasional

IAIS Mengadopsi ICS terhadap Standar Globalnya untuk Mendorong Sektor Asuransi yang Tangguh

IAIS telah mengadopsi *Insurance Capital Standard* (ICS) global dan memperbarui *Insurance Core Principles* (ICP) dan *Common Framework* (ComFrame), yang memajukan pengawasan asuransi internasional. ICS menetapkan ukuran kecukupan modal berbasis risiko untuk *Internationally Active Insurance Groups* (IAIG), yang memastikan solvabilitas dan perlindungan pemegang polis. ICS menyediakan standar pengawasan umum dan menyelaraskan praktik di seluruh yurisdiksi dengan penilaian

implementasi dimulai pada tahun 2027. ICP yang diperbarui mengatasi risiko yang muncul, termasuk perubahan iklim, risiko sistemik, dan standar penilaian, yang memastikan relevansi dan konsistensi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan global dan membangun sektor asuransi yang tangguh.

Sumber: [IAIS adopts Insurance Capital Standard and other enhancements to its global standards to promote a resilient insurance sector](#)

BAGIAN II

Industri Penjaminan

Kolaborasi Penjaminan

Credit Guarantee Corporation of Cambodia (CCGC) dan Kasikornbank Menandatangani Perjanjian Penjaminan Kredit untuk UMKM

Perusahaan Penjaminan Kredit Kamboja (CGCC) dan Kasikornbank (Kbank, Bank berpusat di Thailand) cabang Phnom Penh meresmikan perjanjian jaminan kredit. Kemitraan strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan jaminan pembiayaan bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kamboja. Misi inti CGCC adalah untuk meningkatkan inklusivitas keuangan dan mendorong pertumbuhan UMKM dengan memastikan pinjaman melalui lembaga keuangan yang melayani UMKM. CGCC juga akan berkolaborasi dan belajar dari *Thai Credit Guarantee Corp* (TCGC) yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun.

Sumber: [*CGCC and Kasikornbank ink credit guarantee agreement to boost Cambodian MSMEs*](#)

Pemerintah Thailand Berencana Membangun National Credit Guarantee Agency (NaCGA)

Pada tahun 2024, Kabinet Thailand menyetujui rencana pembentukan *National Credit Guarantee Agency* (NaCGA) dan mengamankan Kementerian Keuangan serta *Bank of Thailand* untuk memulai penyusunan undang-undang yang diperlukan. NaCGA dirancang untuk melengkapi fungsi Perusahaan Penjaminan Kredit Thailand (TCG) yang sudah ada, tetapi dengan metode kerja dan pendekatan penjaminan yang berbeda. NaCGA dan TCG memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan penjaminan kredit. TCG menggunakan skema *Portfolio Guarantee Scheme* (PGS), di mana lembaga keuangan terlebih dahulu mengevaluasi risiko calon peminjam dan hanya merujuk mereka ke TCG jika dianggap berisiko tinggi, dengan jaminan hingga 30% dari portofolio pinjaman. Sementara itu, NaCGA akan beroperasi seperti perusahaan asuransi, langsung mengevaluasi risiko UMKM dan menerbitkan sertifikat penjaminan berdasarkan pendekatan *risk-based pricing*, yang dapat digunakan UMKM untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Pendekatan NaCGA ini dinilai lebih efisien dalam mengurangi beban anggaran negara dibandingkan dengan skema TCG.

Sumber: [*Cabinet to mull credit guarantee agency | National Credit Guarantee Agency to be set up*](#)

Program Penjaminan untuk UMKM

Pemerintah Thailand Menyetujui Dana Penjaminan untuk UMKM sebesar 50 miliar baht

Kementerian Keuangan Thailand baru saja menyetujui dana penjaminan kredit sebesar 50 miliar baht (Rp22,2 triliun) untuk membantu UMKM mengakses kredit yang dikelola oleh *Thai Credit Guarantee Corporation* (TCG). Skema ini bertujuan untuk memberikan jaminan bagi bank, menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem keuangan, mengurangi risiko, dan meningkatkan akses kredit bagi UMKM. Skema ini memberikan jaminan terhadap maksimum pinjaman 40 juta baht (Rp17,8 miliar) per peminjam hingga 10 tahun dengan IJP sebesar 1.75% yang menjamin 30% dari nilai kredit. Prioritas akan diberikan kepada UMKM baru. Skema ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 76,900 UMKM. Pemerintah Thailand mencatat meskipun usaha besar menunjukkan pertumbuhan kredit sebesar 3.3% tahun lalu, namun kredit UMKM turun sebesar 5.1%. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses kredit.

Sumber: [Thai Cabinet approves 55 billion baht lifeline for SMEs and tourism | Thaiger](#)

Ukraina Memperkenalkan Skema Penjaminan Kredit UCGS

Merespon konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, the [Ukraine Credit Guarantee Scheme](#) (UCGS) diperkenalkan oleh Departemen Perusahaan, Perdagangan dan Ketenagakerjaan tahun lalu dan dioperasikan oleh *Strategic Banking Corporation of Ireland* (SCBI). UCGS menawarkan tingkat jaminan sebesar 80% untuk pinjaman kepada UMKM yang terkena dampak ekonomi yang timbul dari konflik di Ukraina. UCGS berakar dari *COVID-19 Credit Guarantee Scheme* (CCGS) yang diperkenalkan oleh Departemen pada tahun 2020 untuk memfasilitasi pinjaman kepada bisnis yang memenuhi syarat yang terkena dampak negatif COVID-19. Meskipun kriteria umum CCGS dan UCGS sebagian besar serupa, ada beberapa perbedaan dalam kriteria yang membedakan keduanya. Salah satunya yakni hanya UMKM dan produsen primer yang berhak mengikuti skema penjaminan UCGS.

Sumber: [Ukraine Credit Guarantee Scheme](#)

British Business Bank meluncurkan Skema Penjaminan ‘Growth Guarantee Scheme’

Pemerintah Inggris bersama dengan *Federation of Small Businesses* (FSB) meluncurkan Skema Penjaminan Pertumbuhan (*Growth Guarantee Scheme*) yang dikelola oleh *British Business Bank*. Skema ini bertujuan untuk mendorong pembiayaan bagi usaha kecil dan peningkatan skala usaha hingga Maret 2026. Skema tersebut bermaksud membantu 11.000 usaha kecil. Program ini akan didukung oleh 41 kreditur. Suku bunga yang tinggi serta keengganan pemberi pinjaman karena risiko gagal bayar menjadi tantangan yang dihadapi perusahaan kecil sehingga diperlukan penyesuaian peraturan untuk mendorong pemberian pinjaman. FSB berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah guna memastikan aliran pendanaan ke perusahaan-perusahaan kecil untuk mendukung pemulihan ekonomi Inggris raya.

Sumber: [*FSB: Growth Guarantee Scheme will help thousands of small firms | SME Magazine*](#)

Penjaminan Pembiayaan Program UMKM Plus di Rumania

The National Credit Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises (FNGCMM) Rumania akan melaksanakan empat dari enam subkomponen program UMKM Plus, yaitu *UMKM Romania Plus*, *Construct Plus*, *UMKM Prod Plus* dan *Agro Plus*. Hal tersebut juga sejalan dengan telah disetujuinya pembiayaan UMKM Plus senilai 2,5 miliar Euro atau sebesar Rp43,5 triliun oleh Komisi Eropa. Di bawah skema UMKM Plus, bantuan akan berbentuk jaminan negara untuk pinjaman investasi dan modal kerja serta subsidi bunga dan biaya, dengan tujuan menyediakan likuiditas yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak gangguan ekonomi akibat perang agresi Rusia terhadap Ukraina.

Sumber: [*FNGCMM implements four of the six sub-programmes of IMM Plus*](#)

Platform ImSME oleh Lembaga Penjaminan di Malaysia dalam mendukung UMKM

Credit Guarantee Corporation (CGC) Malaysia mengembangkan *Platform imSME* (imsme.com.my), sebuah *platform* referral pembiayaan *online* pertama untuk UMKM. Target utama dari *platform* ini adalah UMKM yang mengalami kesulitan mendapatkan kredit atau pembiayaan

dari lembaga keuangan. *Platform* ini membantu menjembatani UMKM dengan mencocokkan kebutuhan pembiayaan mereka dengan opsi pembiayaan yang relevan dari berbagai penyedia, baik perbankan maupun non-bank, yang saat ini melibatkan 14 lembaga keuangan. Selain itu, *platform* ini juga dilengkapi dengan layanan pelatihan untuk peningkatan kapasitas UMKM serta konsultasi untuk membantu UMKM yang gagal mendapatkan pembiayaan, agar dapat mempersiapkan kelayakannya untuk pembiayaan di masa mendatang. Dengan inovasi dari CGC ini, imSME berperan penting dalam mendukung perkembangan sektor UMKM di Malaysia.

Sumber: [Deputy Governor's Keynote Address: CGC launches imSME](#)

Penjaminan untuk *Startup*

Skema Penjaminan Kredit untuk *Startup* di India

Pemerintah India menetapkan Skema Jaminan Kredit untuk *Startup* (*The Credit Guarantee Scheme for Startups-CGSS*) untuk memberikan jaminan kredit terhadap pinjaman yang diberikan kepada *startup* yang diakui pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. Jaminan yang diberikan tidak diberikan langsung kepada *startup*, namun melalui Wali Amanat (*National Credit Guarantee Trustee Corporation atau NCGTC*) yang selanjutnya diberikan kepada lembaga anggota (*Member Institution*) untuk memberi pinjaman tersebut. Instrumen bantuan tersebut dapat berupa utang ventura, modal kerja, pinjaman subordinasi, surat hutang, utang opsional yang dapat dikonversi (*optional convertible debt*), dan fasilitas *fund based* maupun *non-fund based*. Perlindungan jaminan kredit dalam model ini meliputi perlindungan berbasis transaksi (*transaction-based*) maupun *umbrella based*.

Sumber: [Credit Guarantee Scheme for Startups](#)

BAGIAN III

Industri Dana Pensiun

Resolusi/Penyelamatan Dana Pensiun

Kebijakan Dana Talangan Presiden Biden untuk Penyelamatan Program Dana Pensiun

Program dana talangan *multiemployer retirement plan* oleh pemerintahan Biden melindungi dana pensiun terbesar di negara ini dari potensi kebangkrutan *Yellow Corp*, salah satu perusahaan transportasi terbesar di Amerika Serikat. Setiap negara bagian akan memasukkan potensi kebangkrutan *Yellow Corp* ke dalam *American Rescue Plan*. Masuknya dana talangan terbukti penting dalam mencegah hilangnya jaminan pensiun. Tanpa dana talangan sebesar \$36 miliar dari pemerintah federal, kebangkrutan *Yellow Corp* akan “menghancurkan” dana pensiun di Amerika Serikat.

Sumber: [*Yellow's Demise Won't Sink Central States, Due to US Bailout*](#)

Cross Border Operation

Tiga Dana Pensiun Kanada Menghentikan Investasi dan Menutup Kantor Cabang di Tiongkok

Pada awal September 2023, *Canada Pension Plan (CPP) Investments*, yang merupakan dana pensiun terbesar di Kanada telah menghentikan investasi di Tiongkok karena melambatnya pemulihan ekonomi di Tiongkok dan juga akibat ketegangan hubungan negara tersebut dengan Kanada. Selain *CPP Investments*, *Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)* yang merupakan dana pensiun terbesar kedua di Kanada juga telah menutup transaksi dan akan menutup kantor cabang di Tiongkok tahun ini. Sebelumnya, selain kedua dana pensiun tersebut, *The Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP)* juga telah menutup kantor cabang di Tiongkok pada April 2023.

Sumber: [*Canada's largest pension fund trims staff as it puts China deals on hold*](#)

Investasi Dana Pensiun

Dana Pensiun Malaysia KWAP Berinvestasi Sebesar \$107 juta di Perusahaan *Startup* dan Modal Ventura

Dana Pensiun Malaysia, *Kumpulan Wang Persaraan* (KWAP) telah meluncurkan program Dana Perintis senilai 500 juta ringgit (Rp1,6 triliun) untuk berinvestasi di perusahaan *startup* dan modal ventura selama 2 tahun ke depan. Dana tersebut akan mengalokasikan RM250 juta (Rp800 miliar) untuk investasi langsung ke perusahaan *startup* dan sisanya akan diinvestasikan pada modal ventura. Tujuan *Dana Perintis* adalah untuk memacu modal ventura dan ekosistem *startup* nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah Malaysia yaitu Ekonomi Madani, yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Sumber: [Malaysian pension fund KWAP launches \\$107m vehicle to invest in startups, VCs](#)

Ottawa Mempertimbangkan untuk Menghapus Aturan Investasi Domestik 30% Untuk Dana Pensiun

Pemerintah Kanada sedang mempertimbangkan untuk menghapuskan batasan maksimal investasi dana pensiun Kanada ke perusahaan domestik sebesar 30%. Perubahan ini juga disertai dengan persyaratan transparansi yang mengharuskan semua investasi program pensiun disampaikan kepada *Superintendent of Financial Institutions* (OSFI). Pemerintah berpendapat Dana pensiun memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian Kanada dan menciptakan karir bagi masyarakat dalam negeri. Rencana ini tidak akan memberi insentif kepada dana pensiun untuk berinvestasi di dalam negeri, namun dapat meningkatkan imbal hasil kepada para pensiunan.

Sumber: [Ottawa mulls removing 30% rule for pension fund investing](#)

Dana Pensiun Denmark Melepas Saham Tesla sebagai Dampak dari Perselisihan terkait Kontrak Kolektif

Dua Dana Pensiun Denmark melakukan divestasi saham Tesla senilai total €96,3 juta (Rp1,61 triliun) sebagai bagian dari protes terhadap sikap keras Tesla di Swedia mengenai negosiasi kontrak tenaga kerja secara

kollektif. Perselisihan perburuhan di Swedia antara Tesla dan serikat pekerja Swedia *IF Metall*, telah memicu aksi mogok di Swedia serta Norwegia dan meluas ke Denmark. Dana Pensiun Denmark memiliki pendekatan terhadap investasi yang bertanggung jawab didasarkan pada konvensi dan perjanjian internasional, termasuk konvensi *International Labour Organization* (ILO), sehingga isu ini akan berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan.

Sumber: [Danish pension funds drop Tesla shares as Nordic sympathy strikes spread | News](#)

Dana Pensiun M&G Menginvestasikan US\$20 Juta Ke Dalam Platform Derivatif Kripto Inggris

Investasi sebesar US\$ 20 Juta (Rp312 miliar) dari Dana Pensiun M&G kepada *platform* perdagangan derivatif kripto Inggris menandakan bahwa kepercayaan institusional terhadap aset digital telah kembali, terutama setelah runtuhnya perusahaan perdagangan kripto FTX pada tahun lalu. Kegagalan FTX di masa lampau yang diakibatkan skandal penipuan investor membuat beberapa aset manajer, termasuk *Ontario Teachers' Pension Plan*, *Tiger Global Management*, dan *Temasek Holdings* Singapura, merugi senilai puluhan juta dolar. Investasi M&G mungkin menjadi tanda perubahan dukungan institusional terhadap infrastruktur aset kripto.

Sumber: [Pension fund M&G invests US\\$20 million into UK crypto derivatives platform. Banking & Finance - THE BUSINESS TIMES](#)

Investasi Dana Pensiun Iuran Pasti Inggris pada Dana Tidak Likuid

Berdasarkan survei yang dilakukan Forum Investasi Iuran Pasti atau *Defined Contribution Investment Forum* (DCIF), Dana Pensiun Iuran Pasti Inggris tertarik berinvestasi pada sektor swasta, khususnya melalui *Long-Term Asset Funds* (LTAFs). Mayoritas Dana Pensiun yang telah berinvestasi atau berencana investasi di sektor swasta, memilih penempatan pada ekuitas swasta (32%), diikuti oleh utang swasta (25%), dan infrastruktur (20%). Alasan pemilihan investasi di sektor swasta khususnya pada aset jangka panjang yaitu karena kebebasan yang diberikan kepada Dana Pensiun untuk mengakses kelas aset yang berbeda, biaya yang lebih rendah, dan fleksibilitas. Sekitar 58% responden Dana Pensiun mengatakan bersedia

membayar lebih tinggi jika investasi tersebut dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Sumber: [*DC pension scheme majority prefers to access illiquids via LTAFs, survey says*](#)

Dana Pensiun Milik Pemerintah Jepang Mempertimbangkan untuk Berinvestasi pada Bitcoin

Japan's Government Pension Investment Fund (GPIF) sebagai salah satu Dana Pensiun terbesar di dunia, berminat investasi pada bitcoin. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk adaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat dan pergeseran dalam keuangan tradisional. Sebelum rencana investasi pada bitcoin, telah dilakukan penelitian selama 5 tahun untuk menemukan strategi diversifikasi investasi yang inovatif. GPIF akan melakukan asesmen terhadap data yang dikumpulkan dan melakukan *due diligence* sebelum memutuskan rencana lebih lanjut mengenai investasi di bitcoin. Dengan AUM sebesar 225 triliun Yen (sekitar Rp23.500 triliun), langkah yang dilakukan GPIF ini dipercaya dapat mempengaruhi Dana Pensiun secara internasional apabila melakukan diversifikasi investasi pada bitcoin.

Sumber: [*Japan's Trillion Dollar Pension Fund Considers Bitcoin For Diversification*](#)

Korea Selatan Menaikkan Kesepakatan Pertukaran Mata Uang dengan Dana Pensiun Seiring Melemahnya Mata Uang Won

Otoritas valuta asing Korea Selatan mengumumkan kesepakatan dengan *National Pension Service* (NPS) untuk menaikkan batas atas kesepakatan pertukaran mata uang dari \$35 miliar (Rp576,71 triliun) menjadi \$50 miliar (Rp823,87 triliun) guna mempertahankan nilai won yang melemah terhadap dolar. Akhir tahun lalu, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang kesepakatan ini hingga akhir 2024 sebagai bagian dari upaya meredakan volatilitas pasar. Dengan batas atas yang ditingkatkan, NPS dapat meminjam hingga \$50 miliar dari cadangan devisa *Bank of Korea* dengan menukar kepemilikan mata uang lokalnya. Kesepakatan ini bertujuan mengurangi permintaan dolar di pasar domestik dari NPS untuk investasinya di luar negeri.

Sumber: [*South Korea expands currency swap with pension fund as won tumbles*](#) By [*Reuters*](#)

KWAP Malaysia Dorong Investasi Berkelanjutan untuk Masa Depan Hijau

Kumpulan Wang Persaraan (KWAP), dana pensiun sektor publik Malaysia, semakin memperkuat komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi aktif bersama pembuat kebijakan dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif nasional yang bertujuan menjaga keberlanjutan lingkungan. KWAP tengah menjajaki strategi inovatif, termasuk investasi pada modal ventura dan ekuitas swasta, untuk mendukung aspirasi Malaysia menjadi ekonomi berpendapatan tinggi yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi KWAP adalah kurangnya data Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang terstandarisasi, yang menghambat penilaian investasi secara efektif. Untuk mengatasi hal ini, KWAP bekerja sama dengan regulator guna meningkatkan kerangka pelaporan ESG, demi kualitas dan konsistensi data yang lebih baik. Pendekatan ini menunjukkan peran penting investor institusional dalam mendorong perubahan positif, dengan fokus yang bergeser dari sekadar pengelolaan risiko menjadi kontribusi aktif terhadap masa depan berkelanjutan Malaysia.

Sumber: [KWAP, Prudential say institutions driving EM green development | ESG | AsianInvestor](#)

Publikasi Kinerja Dana Pensiun

Pemerintah Jepang Akan Mewajibkan Perusahaan Mempublikasikan Kinerja Dana Pensiun

Di Jepang, Program Pensiun Manfaat Pasti menyampaikan laporan tahunannya kepada Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan. Namun, informasi tersebut umumnya tidak dipublikasikan. Jepang akan mulai mewajibkan publikasi kinerja investasi dana pensiun sebagai bagian dari perbaikan tata kelola dana pensiun. Publikasi kinerja dana pensiun tersebut merupakan salah satu bagian dari rencana Pemerintah Jepang untuk meningkatkan sektor *Asset Management* secara nasional yang disusun tahun ini. Selain publikasi, hal lain yang dibahas adalah peningkatan SDM ahli di bidang dana pensiun, serta kemungkinan perusahaan kecil untuk mengoperasikan dana pensiun bersama. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mendorong reformasi mendasar di sektor

Asset Management sebagai bagian dari rencana kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintahannya.

Sumber: [*Japan wants companies to disclose pension fund performance - Nikkei Asia*](#)

FCA Inggris Menolak Usulan Departemen Keuangan Inggris Terkait Pengungkapan Informasi Investasi Dana Pensiun

Financial Conduct Authority (FCA) menolak untuk mengeluarkan peraturan baru yang direkomendasikan oleh Menteri Keuangan yang mewajibkan Dana Pensiun untuk mengungkapkan informasi tentang investasi yang dilakukan Dana Pensiun di Inggris. Departemen Keuangan mendorong Dana Pensiun agar menginvestasikan lebih banyak dananya dalam perekonomian nasional, sementara FCA menyampaikan bahwa fokus mereka saat ini adalah pengaturan pasca Brexit dan pengaturan sektor baru seperti kripto. FCA menganggap tidak terdapat bukti keluhan dari peserta Dana Pensiun yang dirugikan dengan tidak adanya ketentuan pengungkapan informasi tersebut. Sementara *The Pensions and Lifetime Savings Association* (PLSA) menyampaikan bahwa industri berkenan memberikan informasi skema investasinya, namun dengan pertimbangan tidak adanya biaya yang berlebihan untuk pelaksanaannya.

Sumber: [*Treasury faces FCA resistance over UK pension disclosure drive*](#)

APRA Merilis Tanggapan atas Konsultasi Publik Terkait Pengumpulan Data Dana Pensiun

The Australian Prudential Regulation Authority (APRA) mengeluarkan tanggapan atas konsultasi publik terkait peningkatan pengumpulan data *superannuation* yang berhubungan dengan biaya investasi tidak langsung dan pelaporan laporan keuangan *trustee*. Tanggapan APRA diantaranya: *Pertama*, APRA berkolaborasi dengan industri untuk meningkatkan transparansi dalam pengumpulan data *superannuation*. Hal ini mencakup pengumpulan informasi tentang aliran dana anggota, biaya manajemen investasi, dan pengeluaran dari modal *trustee*. *Kedua*, APRA menekankan bahwa dengan *trustee* yang mengelola miliaran dolar dalam dana pensiun, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memiliki gambaran lengkap tentang cara pengeluaran dan investasi dana tersebut. Data baru yang akan dikumpulkan ini akan mempermudah analisis dan perbandingan

kinerja. Sebagian besar umpan balik dari industri mendukung proposal APRA. Namun, ada saran untuk mengurangi beban pelaporan. Merespon hal ini, APRA akan merevisi standar pelaporan untuk mengurangi beban pelaporan yang selama ini harus dilaporkan oleh Dana Pensiun.

Sumber: [*APRA releases response to consultation on enhancements to superannuation*](#)

Governance

CEO Dana Pensiun di Swedia Mengundurkan Diri Pasca Kerugian Besar Akibat Kegagalan *Silicon Valley Bank* (SVB)

Alecta (<https://www.alecta.se/>) adalah Dana Pensiun yang berdiri sejak tahun 1917 dan mengelola dana pensiun bagi 2,6 juta individu dan 35.000 perusahaan di Swedia. Akibat terkena dampak kegagalan *Silicon Valley Bank* (SVB), *Alecta* telah mengumumkan bahwa Ingrid Bonde akan segera mengundurkan diri sebagai CEO. Tercatat *Alecta* merupakan pemegang saham terbesar keempat di SVB yang menyebabkan kerugian sebesar \$2 miliar atau sekitar Rp31,3 triliun. Selain menyelidiki atas kegagalan investasi tersebut, FSA Swedia juga memeriksa keputusan *Alecta* untuk mengambil saham besar di grup properti Swedia yang sedang mengalami kesulitan yaitu *Heimstaden Bostad*. Hal ini membuat Dewan Direksi *Alecta* menghadapi banyak tekanan mengenai perannya dalam mengawasi keputusan investasi.

Sumber: [*Swedish Pension Fund Hit by SVB Fallout Sees Departure of Chairman & About Alecta*](#)

Cross Border Investment

Dana Pensiun Kanada Melakukan Investasi Besar di Sektor Pertanian Australia

Empat Dana Pensiun dari Kanada yakni *Caisse de Depot et Placement du Quebec* (CDPQ), *Alberta Investment Management Corporation* (AIMCo), *Ontario Teachers' Pension Plan* (OTPP), dan *Public Sector Pension Investment Board* (*PSP Investments*) melakukan investasi besar-besaran pada sektor pertanian di Australia. CDPQ misalnya, telah berinvestasi sebesar USD 100 juta (sekitar Rp1,5 triliun) pada Oktober 2023 dan

digunakan untuk investasi pada pertanian berkelanjutan bekerjasama dengan *Clean Energy Finance Corporation* (CEFC) yang berkedudukan di Australia. Minat Dana Pensiun pada sektor pertanian mencerminkan potensi keuntungan yang stabil dan pertumbuhan jangka panjang dalam industri pertanian di Australia. Selain itu, investasi ini juga sejalan dengan agenda global menuju pertanian berkelanjutan.

Sumber: [Canada's pension funds bet big on Australian agriculture | Alternatives | AsianInvestor](#)

Dana Pensiun Australia Akan Berinvestasi Miliaran Dolar Ke Infrastruktur Inggris

IFM *Investors* merupakan perusahaan investasi yang dimiliki oleh 19 dana pensiun industri Australia. IFM *Investors* telah membuka kantor di London pada tahun 2006 dan berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur Inggris, seperti investasi di jalan tol utama, utilitas dan bandara. IFM *Investors* akan berinvestasi hampir \$20 miliar (Rp310 triliun) ke Inggris selama 4 tahun ke depan. IFM akan menandatangani perjanjian dengan Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris untuk mengidentifikasi peluang yang layak secara komersial. Perjanjian ini merupakan komitmen IFM tahun lalu untuk menginvestasikan £3 miliar (Rp54 triliun) pada aset portofolio infrastruktur yang berbasis di Inggris.

Sumber: [Australian super funds to pump billions into UK infrastructure](#)

Pengelolaan Dana Pensiun

BBVA Grup Argentina Akan Mengelola Dana Pensiun Pemerintah Spanyol

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) merupakan group perbankan terbesar kedua di Spanyol yang beroperasi secara internasional. Salah satu anak perusahaan BBVA yakni *Gestión de Previsión de Pensiones* (GPP) baru saja terpilih menjadi satu dari lima perusahaan manajemen yang akan mengelola dana pensiun pemerintah yang tendernya dilakukan oleh Kementerian Inklusi, Kesejahteraan Sosial dan Migrasi pada bulan Juni 2023. GPP akan mengelola tiga dana pensiun baru yang diharapkan menjadi pelengkap dari asuransi sosial yang saat ini sudah ada dengan target pengelolaan sebesar €500 juta (Rp8,5 triliun) dalam waktu tiga

tahun. Saat ini GPP mengelola sejumlah besar dana pensiun di Spanyol, termasuk lembaga dan perusahaan besar, baik publik maupun swasta. GPP memiliki aset yang dikelola lebih dari €6 miliar (Rp101 triliun) dengan total 185.000 kontributor.

Sumber: [BBVA to manage three of the government-sponsored occupational pension funds](#)

The Government Pension Fund Global Norway Mencatat Laba Sebesar Rp3.325 triliun pada tahun 2023

Norway's Sovereign Wealth Fund (semacam Dana Abadi) yang juga dikenal dengan nama *The Government Pension Fund Global* (GPGF) yang didirikan pemerintah Norwegia pada tahun 1990 dan saat ini menjadi yang terbesar di dunia baru saja mencatatkan laba \$213 miliar atau sekitar Rp3.325 triliun pada Tahun 2023. Laba sebesar ini didukung dari pengembalian investasi pada saham-saham teknologi. GPGF juga mengelola aset tambang minyak yang dimiliki negara sebagai portofolio investasinya. Pada akhir tahun 2023, *Norges Bank Investment Management* selaku pengelola GPGF mengatakan hampir 71% dari dana tersebut diinvestasikan dalam ekuitas, 27,1% pada pendapatan tetap, 1,9% pada *unlisted real estate*, dan 0,1% pada *unlisted* infrastruktur energi terbarukan.

Sumber: [The Government Pension Fund Global \(GPGF\) in Norway & World's largest sovereign wealth fund posts record \\$213 billion profit, boosted by tech stocks](#)

Perlindungan dan Fasilitas Peserta Dana Pensiun

Perubahan dalam Sistem Dana Pensiun di Afrika Selatan

Pemerintah Afrika Selatan menyusun RUU untuk mengubah UU Dana Pensiun yang akan memungkinkan peserta program pensiun untuk mengakses sebagian dari dana pensiun mereka saat masih bekerja, dan sisanya hanya dapat diakses setelah pensiun, hal ini dikenal sebagai “*dua pot*” sistem. Meskipun ada kekhawatiran bahwa sistem baru ini akan memicu investasi menjadi jangka pendek dan menggagalkan tujuan dana pensiun, namun sistem ini mengatasi salah satu isu penting yang ada saat ini yaitu kemampuan seseorang untuk mengakses tabungan pensiunnya.

Sumber: [Another twist for South Africa's new pension system – BusinessTech](#)

Pemerintah Delhi Tunda Pensiun 36.000 Penerima Manfaat Akibat Keterbatasan Anggaran

Pemerintah Delhi mengumumkan penundaan dana pensiun untuk lebih dari 36.000 penerima manfaat dalam Skema Pensiun Janda Nasional Indira Gandhi, karena keterbatasan anggaran. Skema ini memberikan tunjangan bulanan sebesar Rs 2.500/bulan (Rp462 ribu) kepada para janda. Menteri Keuangan India menyoroti hambatan birokrasi di pemerintah Delhi, yang dinilai melawan kepentingan pemerintah pusat setelah amandemen *The Government of National Capital Territory of Delhi* (GNCTD) Act tahun 2021. Amandemen tersebut meningkatkan wewenang Gubernur, menyebabkan ketegangan antara pemerintah pusat dan Delhi, serta menghadirkan tantangan dalam pelaksanaan program dan pemenuhan kewajiban keuangan.

Sumber: [Govt reveals pension delays for 36,000 beneficiaries amid Budget constraints](#)

Sistem Pensiun *Two-Pot* Secara Resmi Ditetapkan dalam Undang-Undang di Afrika Selatan

Presiden Afrika Selatan telah menyetujui amandemen UU yang menetapkan sistem *two-pot*, yang memungkinkan peserta dana pensiun mengakses sebagian dari tabungan mereka. Peran sistem ini memberikan perlindungan bagi individu yang menghadapi tekanan keuangan, namun mencegah penarikan dana total sebelum pensiun. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara keamanan jangka panjang dan kebutuhan mendesak, yang penerapannya akan dimulai pada tanggal 1 September 2024. Melalui sistem ini, sepertiga dari iuran akan dialokasikan untuk tabungan, sementara dua pertiganya akan disimpan hingga masa pensiun. Peserta dapat menarik komponen tabungan setiap tahunnya dengan kriteria tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas tanpa mengharuskan pengunduran diri.

Sumber: [Two-pot retirement system officially established as Ramaphosa signs bill](#)

Panduan Komprehensif Dana Pensiun

Regulator Pensiun Inggris Menerbitkan *General Code of Practice*

Pada Januari 2024, *The Regulator Pension* (TPR) United Kingdom telah menerbitkan *General Code of Practice*, yang sebelumnya dikenal sebagai *Single Code Practice*. Kode Praktik tersebut diharapkan mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024 mendatang. *General Code of Practice* bertujuan untuk menggabungkan 10 kode praktik yang ada menjadi satu kode praktik baru untuk menetapkan ekspektasi yang jelas dan konsisten mengenai tata kelola dan administrasi skema pensiun. Kode baru ini menguraikan secara rinci apa yang TPR harapkan untuk mempertahankan sistem tata kelola yang efektif, dengan menyatukan banyak aspek utama dalam menjalankan suatu skema pensiun, tidak terkecuali dalam hal manajemen risiko.

Sumber: [UK pensions regulator publishes long-awaited General Code of Practice | News | IPE](#)

Aset Dana Pensiun

APRA Australia Meninjau Penilaian *Unlisted Assets* oleh Dana Pensiun

The Australian Prudential Regulation Authority (APRA) awal tahun ini melakukan peninjauan terhadap penilaian aset-aset dana pensiun yang tidak terdaftar (*unlisted assets*), mulai dari *wind farms*, gudang hingga saham perusahaan swasta. Aset seperti ini populer di sektor dana pensiun dan kepemilikannya bisa mencapai 40% dari semua aset di beberapa dana pensiun. APRA melakukan hal ini sebagai upaya jangka panjang untuk membatasi risiko dalam kepemilikan aset yang tidak likuid. Tinjauan ini mencerminkan kekhawatiran yang berlangsung lama di APRA tentang bagaimana dana pensiun menentukan harga aset-aset yang jarang diperdagangkan.

Sumber: [Australia regulator launches review into how pension funds value unlisted assets](#)

Leverage di Dana Pensiun

Penggunaan Strategi *Leverage* oleh Dana Pensiun di Amerika Serikat
Dana Pensiun milik pemerintah AS yang mengelola ratusan miliar dolar aset, semakin mengandalkan strategi *leverage*. Setidaknya delapan dana pensiun publik besar AS menggunakan uang pinjaman atau strategi *leverage* lainnya, dengan *Calstrs* (salah satu Dana Pensiun terbesar) mengizinkan pinjaman hingga \$30 miliar atau 10% dari portofolionya. Penggunaan strategi *leverage* bisa berbalik menimbulkan risiko yang cukup besar, seperti yang terjadi selama *gilt market crisis* tahun 2022 di Inggris. Hal ini memicu peningkatan pengawasan global terhadap praktik ini serta potensi risiko sistemik yang lebih luas yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan nonbank. *Calstrs* menyatakan niatnya untuk menerapkan pemantauan dan tata kelola yang lebih ketat seputar penggunaan *leverage*.

Sumber: [US pension funds worth \\$1.5tn add risk through leverage](#)

Digitalisasi Dana Pensiun

MPFA Hongkong Mengembangkan eMPF sebagai Platform Elektronik Dana Pensiun Tersentralisasi

MPFA sebagai regulator Dana Pensiun di Hongkong memulai reformasi dana pensiun dengan memperkenalkan *platform* eMPF tahun ini. *Platform* yang dipersiapkan sejak tahun 2021 dan pada tahun ini mulai melakukan migrasi data, akan digunakan secara penuh pada tahun depan. eMPF merupakan sistem elektronik terintegrasi yang bertujuan untuk menstandarisasi dan mengotomatisasi proses administrasi MPF (program pensiun wajib) yang akan dikelola oleh 12 MPF *trustee* dengan 350 ribu pemberi kerja dan 4.7 juta peserta. *Trustee* yang ada saat ini seperti HSBC, Manulife dan AIA mempunyai sistem masing-masing dan kebanyakan prosesnya dilakukan secara manual. Pemanfaatan eMPF akan membuat Dana Pensiun Hongkong berjalan secara tersentralisasi, teroganisir dan terbuka. *Platform* ini dapat dipakai untuk pembukaan akun, pembayaran kontribusi, memilih investasi dan penarikan manfaat dari dana pensiun.

Sumber: [eMPF: Reshaping the Hong Kong Pensions Landscape](#) & [Hong Kong's new eMPF Platform](#)

Pembaruan Regulasi Organisasi Tabungan Hari Tua Pegawai India atas Transisi Antar Pekerjaan

Employees' Provident Fund Organisations (EPFO) India melakukan pembaruan regulasi terkait peralihan antar pekerjaan yang berlaku efektif sejak 1 April 2024. Dengan regulasi ini, diatur sistem transfer otomatis saldo tabungan hari tua karyawan apabila yang bersangkutan berpindah perusahaan, dari yang sebelumnya dilakukan permintaan transfer secara manual. Perkembangan ini menandai kemajuan signifikan dalam portabilitas (atau kemampuan atau hak karyawan untuk mempertahankan manfaat tertentu ketika pindah pekerjaan) pegawai India, menyederhanakan proses pengelolaan tabungan hari tua di berbagai jenis pekerjaan.

Sumber: [EPFO's new regulation effective from April 1](#)

Pihak Utama Dana Pensiun

PFRDA India Melakukan Amandemen Sistem Pensiun Nasional dan Peraturan Dana Pensiun terkait *Trustee*

The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) memberitahukan rencana amandemen terhadap *National Pension System Trust (NPST)* dan Peraturan Dana Pensiun pada Februari 2024. Perubahan tersebut meliputi kejelasan sponsor dana pensiun dan pemenuhan kriteria *fit and proper test*, pembentukan komite audit dan komite nominasi & remunerasi, pencantuman klausul nama “dana pensiun”, dan jangka waktu pemenuhan ketentuan dalam jangka waktu 12 bulan, serta laporan tahunan yang harus menyertakan pernyataan tanggung jawab direksi. Amandemen ini merupakan bagian dari upaya untuk menyelaraskan dengan inisiatif APBN 2023-24 dan sesuai dengan UU Anti Pencucian Uang. Amandemen ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola dan aspek kemudahan dalam bisnis (*ease of doing business*).

Sumber: [PFRDA Streamlines Pension Fund Regulations | PFRDA notifies amendments in NPS Trust](#)

Reformasi Sistem Pensiun

Pemerintah Jerman Akan Investasi Rp3.410 Triliun untuk Penguatan Sistem Dana Pensiun

Pemerintah Jerman akan melakukan investasi senilai €200 miliar atau Rp3.410 triliun melalui pembentukan dana investasi saham berdasarkan rancangan undang-undang. Rencana ini dirancang untuk mengurangi tekanan pada sistem Dana Pensiun yang diperkirakan akan mengalami tekanan besar dalam beberapa tahun ke depan karena seluruh generasi “babyboomer” pada usia 50an dan 60an akan segera memasuki masa pensiun. Sebagai langkah pertama, pemerintah akan mengumpulkan utang sebesar €12 miliar atau Rp204,71 triliun pada tahun 2024 yang selanjutnya akan dikelola oleh sebuah badan publik independen. Jumlah tersebut akan meningkat sebesar 3% per tahun.

Sumber: [Germany to create €200bn fund to support strained pension system \(ft.com\)](#)

Reformasi Sistem Pensiun di Prancis

Selama beberapa bulan terakhir, Prancis mendapatkan protes besar terhadap reformasi peraturan dana pensiun. Reformasi sistem pensiun di Prancis telah dimulai sejak 2019 yang berusaha membuat sistem yang seragam dari beberapa skema yang ada namun gagal karena banyaknya demonstrasi. Reformasi pensiun pada 2023 bertujuan untuk menghilangkan proyeksi defisit sistem pensiun pada tahun 2030, yang mencakup 4 komponen utama, yaitu (1) Usia pensiun minimum akan meningkat dari 62 tahun menjadi 64 tahun pada tahun 2030; (2) Peningkatan jangka waktu iuran yang diperlukan untuk pensiun penuh menjadi 43 tahun akan berlaku efektif pada tahun 2027 atau delapan tahun lebih cepat dari sebelumnya; (3) Besaran iuran pensiun minimum akan dinaikkan; dan (4) Sebagian besar program pensiun khusus untuk pekerja di industri jaringan (listrik, gas, metro), bank sentral, pegawai notaris, dan lain lain, akan ditutup untuk karyawan baru mulai September 2023.

Sumber: [The 2023 France Pension Reform - Intereconomics](#)

Reformasi Dana Pensiun di Amerika Serikat Melalui *Secure 2.0 Act*

Secure 2.0 Act, yang mulai berlaku pada tahun 2025, bertujuan untuk meningkatkan tabungan pensiun dengan sejumlah reformasi penting.

Pertama, pekerja berusia 60 hingga 63 tahun dapat melakukan kontribusi tambahan hingga \$10.000 (Rp150 juta) per tahun. Kedua, pemberi kerja juga diwajibkan untuk secara otomatis (*automatic enrolment*) mendaftarkan karyawan ke dalam rencana 401(k) atau dana pensiun yang disediakan oleh pemberi kerja terutama swasta dan 403(b) atau dana pensiun untuk pekerja dari sektor sekolah milik pemerintah, beberapa NGO dan juga organisasi keagamaan dengan kontribusi awal minimum 3% hingga 10% dari pendapatan sebelum pajak. Ketiga, mulai tahun 2025, *provider* dana pensiun dapat menawarkan portabilitas otomatis, yang memungkinkan karyawan untuk mentransfer akun dana pensiun mereka saat berganti pekerjaan. Meskipun perubahan ini memberikan peluang signifikan untuk meningkatkan tabungan dana pensiun, ketentuan lain seperti penarikan darurat tanpa penalti dapat mengurangi akumulasi tabungan pensiun.

Sumber: [*What Retirement Savers Need to Know About the SECURE 2.0 Act*](#)

Kementerian Sosial Swiss Mengusulkan Reformasi Kecil Setelah Penolakan Reformasi Pensiun

Reformasi dana pensiun di Swiss yang meliputi usulan untuk menurunkan ambang batas masuk sistem dana pensiun dan penyesuaian tingkat konversi yang akan digunakan untuk menghitung rekening pensiun ditolak karena ketidakpastian dan ketidakjelasan karena masyarakat merasa tidak yakin bagaimana reformasi akan berpengaruh secara positif terhadap pensiun mereka. Setelah hasil pemungutan suara yang menolak reformasi *Berufliche Vorsorge Gesetz* (BVG atau *Occupational Pensions Act*) tersebut, Kementerian Sosial menekankan bahwa kondisi yang ada saat ini tidak dapat dipertahankan dan langkah-langkah kecil yang lebih sederhana dan transparan perlu tetap dilakukan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah situasi individu berpenghasilan rendah, terutama banyak wanita yang hanya akan menerima pensiun kecil atau bahkan tidak ada sama sekali dari skema pensiun yang ada saat ini. Laporan dari *Swiss Financial Market Supervisory Authority* (FINMA) menyampaikan bahwa dana pensiun di Swiss menghadapi tantangan serius akibat populasi yang menua dan penurunan tingkat bunga, yang berdampak pada kinerja investasi. Reformasi yang lebih kecil mungkin lebih mudah diterima oleh publik dan dapat diimplementasikan lebih cepat, memungkinkan

pemerintah untuk menjawab kebutuhan mendesak tanpa menciptakan kerumitan yang besar.

Sumber: [*Baume-Schneider calls for smaller reform steps after BVG rejection*](#)

Transformasi Sistem Pensiun Belanda Pasca Revisi UU Pensiun

Revisi UU Pensiun Belanda membawa perubahan besar dalam sistem pensiun yang ada saat ini senilai €1,5 triliun (Rp25.000 triliun) dengan mengubah model manfaat pasti (DB) menjadi iuran pasti (DC) dan memperkenalkan dua skema baru, yaitu Skema Premi Solidaritas (SPR) dan Skema Premi Fleksibel (FPR). SPR menekankan pembagian risiko melalui cadangan solidaritas dan alokasi pengembalian berbasis kelompok, sementara FPR memberikan eksposur aset langsung yang serupa dengan skema DC tradisional, namun dengan fleksibilitas lebih tinggi. Perubahan ini mengharuskan dana pensiun untuk mendesain ulang model investasi, meningkatkan pertukaran data, dan memperbaiki komunikasi dengan anggota untuk menciptakan transparansi dan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, penyedia layanan memiliki peran penting dalam mendukung transisi melalui pelaporan yang terperinci, personal, dan berbasis kebutuhan peserta.

Sumber: [*PENSION PARTNERSHIPS Dutch pension funds in a post-Pensions Act world - Securities Services*](#)

Reformasi Sistem Pensiun Tiongkok: Kenaikan Usia Pensiun dan Keberadaan Dana Pensiun Individu.

Tiongkok akan menaikkan usia pensiun mulai Januari 2025 untuk menghadapi populasi yang menua dan berkurangnya jumlah pekerja. Usia pensiun perempuan di sektor kasar naik dari 50 menjadi 55 tahun, sementara untuk pekerjaan kantoran naik dari 55 menjadi 58 tahun. Untuk laki-laki, usia pensiun naik dari 60 menjadi 63 tahun, dengan perubahan bertahap selama 15 tahun. Mulai 2030, masa kerja minimum untuk mendapatkan pensiun juga akan bertambah dari 15 tahun menjadi 20 tahun pada 2039. Mengatasi tantangan ini, Tiongkok juga mulai memperkenalkan pilar ketiga *private pension* dan dana pensiun individu pada 2018. Saat ini, sistem pensiun Tiongkok memiliki tiga pilar yakni dana pensiun wajib (1,06 miliar peserta), program pensiun tambahan pemberi kerja (80 juta peserta), dan *private pension* dan dana pensiun individu yang memberikan

fleksibilitas dan diberikan insentif pajak (60 juta peserta hingga 2024). Reformasi ini bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mempersiapkan pensiun dan mengurangi beban pemerintah.

Sumber: Materi NFRA Tiongkok pada IOPS Global Forum 2024 dan [artikel terkait](#).

Tiongkok Berencana Menaikkan Usia Pensiun Tenaga Kerja

Tiongkok akan secara bertahap menaikkan usia pensiun, yang akan berdampak pada lebih dari 500 juta pekerja karena negara tersebut menghadapi populasi yang menua dan angka kelahiran yang menurun. Bagi laki-laki, usia pensiun akan dinaikkan dari 60 menjadi 63 tahun, sedangkan bagi perempuan, dari 55 menjadi 58 tahun. Selain kenaikan usia pensiun, akan ada persyaratan untuk kontribusi lebih lama ke dalam sistem pensiun agar dapat mengakses manfaat pensiun. Reformasi ini diuraikan dalam rencana lima tahun dan bertujuan untuk mengatasi tekanan yang semakin besar pada dana pensiun serta penyusutan tenaga kerja dengan memungkinkan “partisipasi sukarela” dengan tingkat fleksibilitas yang sesuai. Perubahan yang telah tertunda selama lebih dari satu dekade ini menjadi mendesak karena berkurangnya populasi usia kerja. Selain itu, reformasi ini juga terkait dengan upaya yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang lebih “ramah kelahiran” guna mengatasi rendahnya angka kelahiran dan mendukung pertumbuhan populasi.

Sumber: [China moves to raise retirement age to ease labor and pension concerns - Nikkei Asia](#)

Perubahan Kebijakan

Dukungan Parlemen Afrika Selatan terhadap Amandemen Undang-Undang Dana Pensiun

Seluruh partai politik di parlemen Afrika Selatan mendukung rancangan undang-undang mengenai dana pensiun untuk memungkinkan peserta menarik sebanyak sepertiga dari tabungannya sebelum pensiun. Dalam RUU tersebut dana pensiun diharuskan dibagi menjadi tiga komponen atau “pot” yang terdiri tabungan (*savings*), dana pensiun (*retirement*), dan bagian yang menjadi haknya (*vested portion*). RUU ini memungkinkan peserta untuk mengalihkan atau menarik tabungan jika mereka pindah atau

kehilangan pekerjaan. Akan tetapi penarikan tabungan pensiun tersebut akan dikenakan pajak. Saat ini, RUU akan diusulkan kepada Dewan Nasional Provinsi sebelum diserahkan ke Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Target penerapan undang-undang ini pada 1 September 2024, namun masih terdapat isu atas pengenaan pajak atas penarikan dana dan penyelesaian *overlap* dengan undang-undang lain.

Sumber: [South African lawmakers vote in favor of pension funds reform law | Pensions & Investments](#)

Sustainable Finance

Meksiko Melakukan Amandemen Ketentuan Umum Keuangan Sistem Pensiun di Meksiko

Kementerian Keuangan dan Perkreditan Rakyat Meksiko melalui National Commission of the Retirement Savings System (CONSAR) mengeluarkan amandemen ketentuan umum keuangan sistem pensiun. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mekanisme manajemen risiko yang berlaku bagi Manajer Dana Pensiun (AFOREs), memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai penghitungan batasan investasi pada aset luar negeri melalui *Investment Trust Certificates* (CERPI), dan memasukkan pertimbangan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) ke dalam peraturan pelaporan yang berlaku untuk investasi yang dilakukan oleh AFOREs. Aturan ini mewajibkan pelaporan aspek ESG kepada CONSAR, termasuk di dalamnya adalah keputusan investasi dan manajemen risiko terhadap ketentuan ESG.

Sumber: [Mexican Retirement Funds Financial Regulations Amended | Insights | Mayer Brown](#)

Dukungan CAPSA terhadap Keuangan Berkelanjutan di Industri Dana Pensiun

The Canadian Association of Pension Supervisory Authorities (CAPSA) selaku regulator pensiun di Kanada mendukung keuangan berkelanjutan dan pengawasan berbasis risiko. Pedoman Manajemen Risiko CAPSA, yang berlaku mulai September 2024, menekankan tugas fidusia administrator untuk mengelola risiko, termasuk pertimbangan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Integrasi ESG dibingkai sebagai hal yang

penting untuk penilaian risiko-imbang hasil finansial dan selaras dengan tanggung jawab fidusia. Pedoman ini memberikan prinsip-prinsip tentang mengidentifikasi, menilai, dan mengomunikasikan faktor-faktor ESG, mendorong tinjauan berkala dan kebijakan yang transparan. CAPSA terus mensosialisasikan praktik-praktik ini dan menyerahkan implementasi dan pengawasan kepada masing-masing regulator, dengan kesiapan sistem penuh diharapkan pada tahun 2026.

Sumber: Materi CAPSA Kanada pada IOPS Global Forum 2024

Akun Dana Pensiun

Restrukturisasi Rekening Dana Pensiun di Malaysia

Employee's Provident Fund (EPF) atau *Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)* Malaysia mengelola rencana tabungan wajib dan perencanaan pensiun bagi pekerja sektor swasta di Malaysia. Keanggotaan EPF bersifat wajib bagi warga negara Malaysia yang bekerja di sektor swasta. EPF saat ini sedang melakukan restrukturisasi rekening EPF yang mulai berlaku pada 11 Mei 2024 guna menyeimbangkan kebutuhan masa pensiun dengan kebutuhan finansial jangka pendek, menengah dan panjang. Restrukturisasi rekening peserta dilakukan dari 2 (dua) akun menjadi 3 (tiga) akun, yaitu: (1) *Akaun Persaraan*, yakni akumulasi tabungan yang menjadi penghasilan pada saat pensiun (2) *Akaun Sejahtera*, yakni rekening untuk kebutuhan saat pensiun, dan (3) *Akaun Fleksibel*, yakni rekening baru untuk kebutuhan finansial jangka pendek yang dapat ditarik kapanpun. Semua kontribusi setelah tanggal 11 Mei 2024 akan dialokasikan sesuai dengan rincian berikut: 75% ke *Akaun Persaraan*, 15% ke *Akaun Sejahtera* dan 10% ke *Akaun Fleksibel*.

Sumber: [EPF Account Restructuring Set to Address Members' Life Cycle Needs](#)

Kelembagaan Dana Pensiun

Otoritas Dana Pensiun Ghana Melakukan Perubahan Struktur Biaya bagi Dana Pensiun

National Pension Regulatory Authority (NPRA) Ghana baru saja melakukan perubahan struktur biaya pendaftaran dan perpanjangan izin

bagi pengelola dana pensiun. Langkah ini bertujuan untuk memastikan stabilitas industri dana pensiun serta menyeimbangkan kewajiban finansial dengan kebutuhan pengawasan oleh NPRA. Selain itu, perubahan ini dimaksudkan untuk mempertahankan sektor dana pensiun dan melindungi kepentingan pemberi kerja dan penerima manfaat dana pensiun. Pengelola dana pensiun diwajibkan untuk mematuhi perubahan aturan tersebut untuk menghindari denda, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas industri untuk kepentingan jangka panjang peserta dana pensiun.

Sumber: [*New fee structure introduced for pension service providers*](#)

Sertifikasi dan Pelatihan Pengawas

Sertifikasi dan Pelatihan Pengawas *Mandatory Provident Fund Schemes Authority* (MPFA)

Program rekrutmen pengawas dana pensiun di Hongkong yang dilakukan oleh MPFA tidak dilakukan melalui perekrutan massal (*batch recruitment*), melainkan fokus pada perekrutan individu untuk posisi pengawas dengan tanggung jawab tertentu. Selain itu, pengawas baru yang bergabung dengan MPFA diharapkan sudah memiliki latar belakang yang relevan dengan tugas pengawasan. Oleh karena itu, program sertifikasi dan kurikulum yang bersifat umum tidak sesuai dengan kebutuhan MPFA. Sebagai gantinya, MPFA menyediakan pelatihan kerja yang disesuaikan untuk pengawas baru berdasarkan tugas dan keahlian yang mereka miliki.

Sumber: *Korespondensi OJK PPDP melalui email dengan MPFA*

Besaran Kontribusi Dana Pensiun

Kontribusi Pekerja di Singapura untuk Dana Pensiun melalui *Central Provident Fund* (CPF)

Pada tahun 2024, terdapat penyesuaian kontribusi pensiun pekerja di Singapura melalui *Central Provident Fund* (CPF). Jika upah pekerja lebih dari 750\$ per bulan (Rp11,5 juta) maka total iuran CPF adalah sebesar 37%. Dari jumlah ini, 17% disumbangkan oleh pemberi kerja, sementara 20% diambil dari upah karyawan. Kontribusi yang diambil dari upah diatur berdasarkan usia sebagai berikut: 20% untuk usia 55 tahun

kebawah; 16% bagi usia di atas 55 hingga 60 tahun; 10,5% bagi usia 60 hingga 65 tahun; 7,5% bagi usia 65 hingga 70 tahun; dan 5% bagi usia di atas 70 tahun. Keterlambatan pembayaran oleh perusahaan akan dikenakan bunga tahunan sebesar 18%, dan hukuman termasuk denda dan penjara. CPF dapat digunakan untuk membayar kebutuhan perumahan, perawatan kesehatan, dan perawatan lansia. Pekerja juga dapat melacak dana pensiunnya melalui portal My CPF.

Sumber: [*An Essential Guide: Mastering CPF Contributions for Employees in Singapore*](#)

Potensi Pendanaan yang Tidak Memadai untuk Dana Pensiun di Thailand

Fiscal Policy Office (FPO) Thailand telah memperingatkan bahwa *Social Security Fund* (SSF) akan menghadapi tantangan keuangan jangka panjang karena pendanaan yang tidak memadai untuk pensiun hari tua. Untuk mengatasi hal ini, FPO merekomendasikan peningkatan kontribusi pemerintah dari 12,75% menjadi 18% dan melunasi utang yang belum dibayar kepada SSF sebesar 71,4 miliar baht (Rp32,5 triliun). Laporan FPO menyoroti bahwa rasio pendanaan (*funding ratio*) di Thailand secara signifikan lebih rendah daripada standar global, yang menunjukkan pendapatan masa depan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan pengeluaran yang diproyeksikan. Solusi yang diusulkan termasuk menaikkan usia pensiun dan meningkatkan basis upah maksimum secara bertahap sebagai dasar perhitungan kontribusi dari 15.000 baht (Rp6.8 juta) menjadi 23.000 baht (Rp10,5 juta). Dengan demikian, kelompok berpenghasilan tinggi akan berkontribusi lebih untuk SSF.

Sumber: [*Warning over inadequate funding for pensions*](#)

Peningkatan Kontribusi Pekerja di Filipina Untuk *Social Security System* (SSS)

Mulai 2024, kontribusi bulanan untuk *Social Security System* (SSS) di Filipina mengalami peningkatan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak manfaat bagi para anggota SSS di masa depan, terutama dalam hal pembayaran pensiun. Perbandingan antara tarif kontribusi lama dan baru menunjukkan peningkatan pada persentase kontribusi baik dari karyawan maupun pemberi kerja. Pada tarif lama, kontribusi terdiri dari 4% dari pekerja dan 8% dari pemberi kerja, dengan

total 12%. Tarif baru meningkatkan kontribusi menjadi 4,5% dari pekerja dan 8,5% dari pemberi kerja, dengan total 13%. Selain itu, batas gaji bulanan yang menjadi dasar perhitungan kontribusi juga mengalami perubahan. Sebelumnya, batas gaji ini berkisar antara 2.000 (Rp550 ribu) hingga 20.000 peso (Rp5,5 juta), namun dengan tarif baru, batas tersebut meningkat menjadi 3.000 (Rp820 ribu) hingga 25.000 peso (Rp6,8 juta).

Sumber: [SSS Monthly Contribution 2024](#)

Reformasi dan Kenaikan Iuran Pensiun di Korea Selatan

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berjanji untuk segera mereformasi dana pensiun nasional (salah satu yang terbesar di dunia dengan aset \$860 miliar atau Rp13.500 triliun) guna memastikan keberlanjutan bagi populasi yang menua. Saat ini, sistem pensiun telah kehilangan kepercayaan publik, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda. Presiden Yoon mengusulkan untuk menaikkan tarif iuran, khususnya dengan membedakan kenaikan berdasarkan kelompok usia agar dapat menyeimbangkan beban. Dana pensiun Korea Selatan, yang diperkirakan akan habis pada tahun 2055, memiliki kontribusi yang rendah, yaitu sebesar 9% dari pendapatan, dibandingkan dengan rata-rata negara OECD sebesar 15,4%. Akibatnya, para lansia di Korea Selatan hanya menerima 31,2% dari gaji, sementara rata-rata OECD sebesar 50,7%, menjadikan mereka salah satu pensiunan termiskin di negara-negara OECD. Partai oposisi Demokrat yang menguasai parlemen mengkritik rencana reformasi ini karena hal tersebut akan memecah belah generasi muda dan tua karena perbedaan tarif iuran.

Sumber: [South Korea's Yoon pledges urgent reform of \\$860 billion public pension fund](#)
[| Reuters](#)

Skema Dana Pensiun

Dinamika Konversi Dana Pensiun Manfaat Pasti menjadi Iuran Pasti di Belanda

Salah satu partai politik terkemuka di Belanda yaitu *New Social Contract* (NSC), memiliki gagasan bahwa konversi manfaat pasti (DB) menjadi iuran pasti (DC) hanya dapat dilakukan jika mayoritas anggota dana pensiun menyetujuinya. Dana Pensiun terbesar di Belanda, *Stichting*

*Pensioenfond*s APB, menganggap bahwa rencana tersebut rumit untuk dilaksanakan. Usulan NSC ini juga akan membutuhkan perubahan undang-undang tentang dana pensiun yang baru berlaku Juli 2023 dimana UU tersebut merupakan reformasi pensiun terbesar yang pernah ada di Belanda yang memuat aturan peralihan dari pensiun manfaat pasti (DB) ke sistem iuran pasti (DC).

Sumber: [Dutch pension funds fear 'ill-fated idea' to grandfather accruals | News | IPE](#)

Skema Baru CDC untuk Dana Pensiun di Inggris

Skema *Collective Defined Contribution* (CDC) merupakan jenis baru skema pensiun yang diperkenalkan melalui UU Skema Pensiun Inggris. Skema ini menawarkan pendekatan kolektif terhadap pengelolaan dana pensiun, dengan menggabungkan elemen dari skema manfaat pasti (*Defined Benefit*) dan iuran pasti (*Defined Contribution*). Dalam skema CDC, baik pemberi kerja maupun karyawan memberikan kontribusi ke dalam dana kolektif yang dikelola bersama. Dana ini kemudian digunakan untuk memberikan pendapatan pensiun bagi anggota. Tidak seperti skema manfaat pasti, pemberi kerja tidak menjamin jumlah pensiun yang dibayarkan. Sebaliknya, skema CDC memberikan target pensiun yang dapat disesuaikan sesuai dengan kinerja dana. Jika dana kolektif mengalami surplus atau defisit, pensiun anggota dapat dinaikkan atau diturunkan. Selain itu, berbeda dengan skema iuran pasti, dana dalam skema CDC tidak dikelola secara individu, tetapi dikelola secara kolektif untuk seluruh anggota. Saat ini, *Royal Mail Collective Pension Plan* adalah satu-satunya skema CDC yang telah disahkan oleh *The Pensions Regulator*, yang mulai beroperasi pada 7 Oktober 2024. Pemerintah Inggris berencana memperluas penerapan skema ini ke *multi-employer CDC schemes* pada tahun 2025.

Sumber: [Pensions: Collective Defined Contribution \(CDC\) schemes - House of Commons Library](#)

Perluasan *National Pension System* (NPS) India untuk Anak-Anak

National Pension System (NPS) adalah program pensiun berbasis kontribusi yang diperkenalkan di India pada tahun 2004 untuk pegawai pemerintah dan diperluas kepada individu swasta pada tahun 2009, korporasi pada tahun 2010, serta anak-anak mulai usia 0 tahun pada tahun

2024. Program ini dirancang untuk menjadi fleksibel, terjangkau, berbasis digital, dan berorientasi pasar, dengan tujuan menciptakan sistem pensiun yang berkelanjutan secara finansial. Keunggulan NPS terletak pada fleksibilitasnya dalam menawarkan pilihan investasi antara ekuitas dan obligasi, dengan hasil yang ditentukan oleh nilai aset bersih (NAV) harian. NPS memiliki biaya pengelolaan yang sangat rendah, berkisar antara 0,09-0,59% dari aset yang dikelola, menjadikannya salah satu program pensiun dengan biaya terendah di dunia. Peserta dapat dengan mudah mengakses akun mereka melalui aplikasi digital dan berbagai metode pembayaran, termasuk *Unified Payments Interface* (UPI). Selain mencakup peserta dari usia 0 hingga 70 tahun. NPS juga terbuka untuk Warga Negara India di luar negeri (NRI) dan Warga Negara Asing Keturunan India (OCI), memperluas cakupan manfaatnya ke komunitas global.

Sumber: [NPS Vatsalya launched for kids: Know investment amount, eligibility, & more | Personal Finance - Business Standard](#)

Buku **“Global Insights: Kumpulan Isu Internasional Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun”** ini tidak hanya menjadi refleksi atas dinamika dan perkembangan internasional, tetapi juga panduan strategis dalam membangun ekosistem keuangan nasional yang tangguh. Artikel dalam buku ini menggambarkan kompleksitas dan prioritas dalam mengembangkan dan memperkuat industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Buku ini memberikan pembelajaran dari berbagai negara yang berguna untuk memperkaya analisis dalam menyusun regulasi, memperluas kolaborasi lintas sektor, dan memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan global. Dalam hal ini, OJK juga terus menjembatani kebutuhan nasional dengan menyesuaikan praktik terbaik yang diterapkan di berbagai belahan dunia.

Ogi Prastomiyono

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

